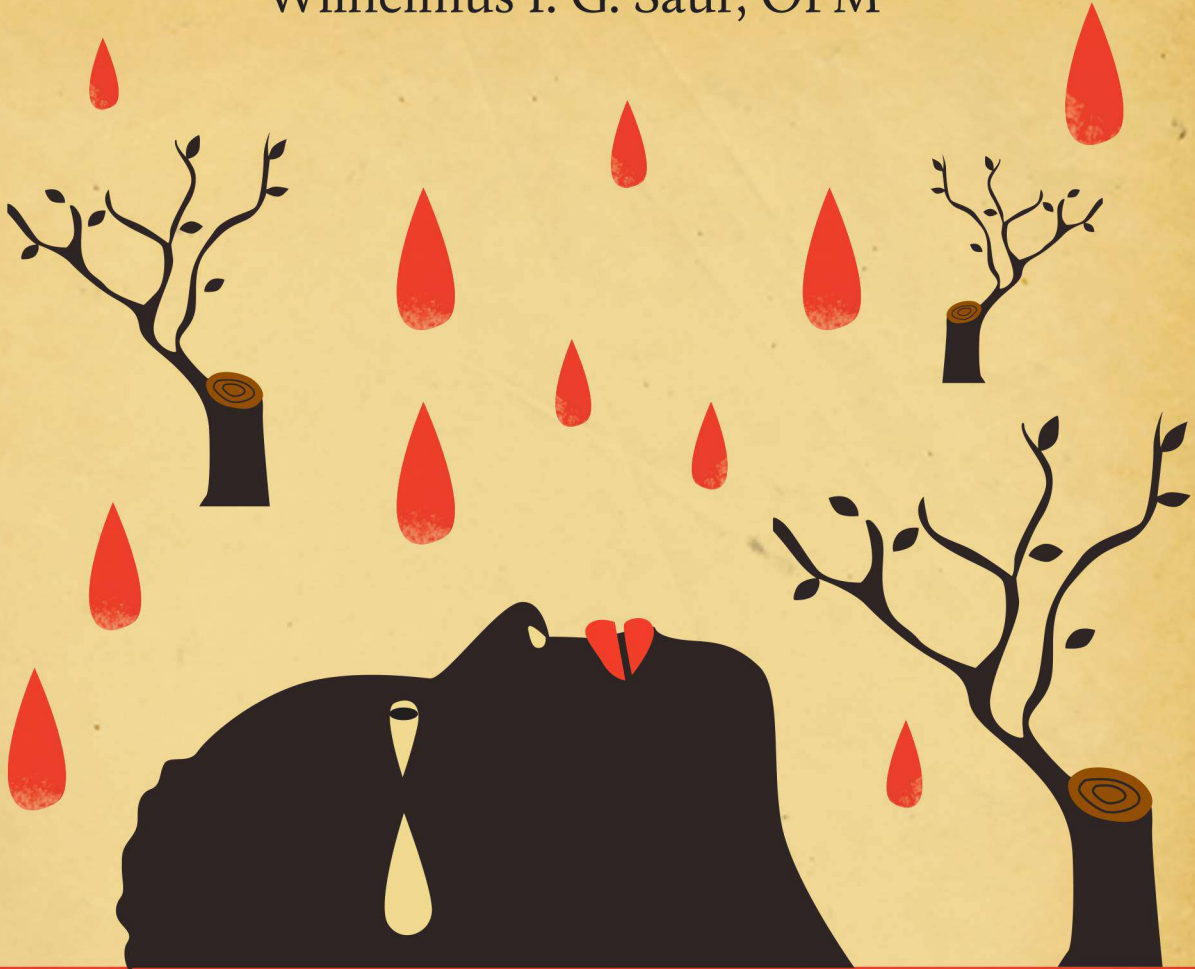


Bernard Korten
Wilhelmus I. G. Saur, OFM



Seri Memoria Passionis No.35

YANG HILANG DAN TUMBUH DALAM 'ENDEMI' KEKERASAN

**BERAGAM PERISTIWA DAN FAKTA
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA 2017**

Seri Memoria Passionis No.35

Yang Hilang dan Tumbuh dalam 'Endemi' Kekerasan

**BERAGAM PERISTIWA DAN FAKTA
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA 2017**

Seri Memoria Passionis No.35

Yang Hilang dan Tumbuh dalam ‘Endemi’ Kekerasan

**BERAGAM PERISTIWA DAN FAKTA
HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA 2017**

Bernard Koten
Wilhelmus I. G. Saur, OFM



Sekretariat Keadilan, Perdamaian,
Dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

**Yang Hilang dan Tumbuh dalam 'Endemi' Kekerasan:
Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2017**

Copyright© 2019, SKPKC Fransiskan Papua

Cetakan Pertama, Januari 2019

Penerbit
SKPKC Fransiskan Papua
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura
Papua 99352
www.fransiskanpapua.org
Email: skpkc2010@gmail.com

Tim Penulis:
Bernard Koten
Wilhelmus I.G. Saur, OFM

Editor: Basilius Triharyanto

Grafis dan lay out: Anastasia Lintang

KOTEN, Bernard dan Wilhelmus I.G. Saur
Yang Hilang dan Tumbuh dalam 'Endemi' Kekerasan
Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua
v + 93; 17 cm x 24 cm
ISBN: 978-602-74463-7-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis oleh Penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

Bab 1 — 1

Layanan Kesehatan Buruk: Anak-anak Terus Menjadi Korban

Bab 2 — 14

HIV/AIDS: Orang Papua dalam Bahaya dan Stigma

Bab 3 — 24

Pembungkaman Ruang Kebebasan Berekspresi —

Bab 4 — 30

Tambang Freeport: Konflik Bersenjata dan Distorsi Informasi

Bab 5 — 38

Represi Aparat Keamanan: Penyiksaan, Penembakan, Sweeping

Bab 6 — 60

Proyek Sawit dan Emas: Berkah atau Kutukan

Bab 7 — 72

Dunia Internasional Terus Memantau Hak Asasi Manusia di Papua

Bab 8 — 78

Dialog Jakarta-Papua: Jalan Damai yang Masih Membatu

Bab 9 — 84

Kebijakan Joko Widodo: Infrastruktur Minus Hak Asasi Manusia

Bab 10 — 90

Penutup

Kata Pengantar

Tanah Papua menyimpan sejumlah kisah pahit dan manis yang selalu dialami dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Pada tahun 2017, kisah pahit tentang manusia dan Tanah Papua masih tetap terjadi dan tak terelakan. Berbagai kisah pahit tersebut, untuk para pelaku sengaja dilupakan. Namun bagi para korban kisah pahit itu tetap terekam dengan tujuan mencari keadilan dan kebenaran.

“Yang Hilang dan Tumbuh dalam ‘Endemi’ Kekerasan” merupakan rekaman atas segala kisah pahit. Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) merekam lagi kisah pahit tersebut. Rekaman itu tentang generasi Papua yang hilang entah karena layanan dasar kesehatan yang buruk, karena pembungkaman suara kritis, karena kepentingan kapitalis, egoisme birokrasi, atau hilang karena kepentingan Negara Republik Indonesia dan hilang karena tidak merawat dirinya sendiri.

Dalam situasi yang suram dan pahit tersebut, masih ada generasi muda di Tanah Papua yang terus tumbuh untuk menuntut keadilan dan kebenaran serta pengakuan terhadap hak-haknya. Generasi muda ini terus melawan ketidakadilan. Mereka melawan derasnya arus ekspansi yang dilakukan oleh para investor terhadap tanah ulayatnya. Generasi muda ini terus menuntut kebenaran sejarah kehidupan suku bangsanya, Papua. Perjuangan untuk menuntut agar Tanah Papua bebas dari segala macam penjajahan terus dilakukan walaupun mereka mendapatkan perlakuan keras dari Negara Indonesia.

Buku “Yang Hilang dan Tumbuh dalam ‘Endemi’ Kekerasan: Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Papua 2017” ini membantu kita untuk melihat persoalan-persoalan yang dialami dan dirasakan oleh manusia dan Tanah Papua dari perspektif HAM. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama menceritakan kisah buram yang klasik terkait layanan dasar di Tanah Papua. Kisah pilu tentang kesehatan dibahas dalam bagian ini: ketiadaan petugas medis, merebaknya berbagai penyakit yang merenggut nyawa masyarakat. Situasi kesehatan yang buruk terjadi di sejumlah daerah otonomi baru atau kabupaten-kabupaten pemekaran.

Lalu penyebaran HIV/AIDS yang terus meluas di Tanah Papua dibahas lebih dalam pada Bab Dua. Penduduk Papua dalam situasi berbahaya atau darurat karena terancam oleh HIV/AIDS, namun tak ada gerakan yang masif dan besar untuk menghentikan dan mencegah meluasnya penyebaran HIV/AIDS.

Pada Bab Ketiga buku ini membahas pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat. Negara terus membungkam suara kritis terhadap segala persoalan di Tanah Papua: pelurusan sejarah dan pelanggaran HAM. Ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum selalu mendapat perlawanan dari Negara melalui aparat keamanan.

Selanjutnya Bab Empat mengungkapkan situasi 'perang' atau konflik bersenjata di wilayah tambang PT Freeport Indonesia. Peristiwa penyanderaan yang viral diberitakan media menjadi polemik terkait independensi media. Media terlihat bias dalam meliput konflik bersenjata antara TPN/OPM dengan TNI-Polri.

Dalam Bab Lima, laporan ini menyoroti represi aparat keamanan kepada masyarakat sipil di Tanah Papua. Operasi Mantap Praja dan insiden-insiden kekerasan dilakukan oleh anggota polisi dan tentara telah berdampak negatif bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Asas keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan dalam menghukum dan mengadili para anggota yang terlibat dalam aksi kekerasan, yang telah memakan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Orang-orang muda Papua banyak menjadi korban dari insiden kekerasan tersebut.

Laporan tentang persoalan perampasan tanah dalam investasi pertambangan dan perkebunan dibahas pada Bab Enam. Kekayaan alam dikelola secara tidak adil dan merugikan masyarakat, terutama munculnya kasus-kasus perampasan tanah dan kekerasan dalam proyek investasi. Laporan ini mempertanyakan proyek investasi yang berdampak buruk bagi lingkungan dan sosial masyarakat Papua. Ekspansi para investor di Papua yang melibatkan para elit birokrasi pusat dan daerah serta aparat keamanan telah merugikan masyarakat atau pemilik tanah ulayat. Kasus perampasan tanah ulayat oleh perusahaan yang didukung aparat keamanan ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat adat.

Lalu bagaimana tentang persoalan hak asasi manusia di Papua? Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia terus mendapatkan sorotan tajam. Mengalirnya dukungan negara-negara di kawasan Pasifik dan benua Eropa diulas dalam Bab Tujuh. Negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) menyuarkan situasi buruknya hak asasi manusia di Tanah Papua dalam forum dunia PBB.

Bab Delapan buku ini mengulas persoalan penyelesaian konflik Papua melalui cara dialog. Gagasan dialog sebagai cara mencari solusi atau jalan keluar bagi

penyelesaian berbagai persoalan di Tanah Papua sempat muncul kembali, dan mendapatkan perhatian dari Pemerintahan Joko Widodo. Namun, lagi-lagi dialog terhambat dalam prosesnya, termasuk apa yang dibicarakan dalam dialog tersebut. Rakyat Papua mempertanyakan dialog yang tak menyentuh persoalan utama; pelanggaran hak asasi manusia, bahkan aspirasi politik rakyat Papua.

Pemerintah Joko Widodo kurang mendapatkan apresiasi dari rakyat Papua dalam penegakan hak asasi manusia. Hal ini karena rendahnya komitmen pemerintah, terutama kemauan politik Joko Widodo dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan sekarang. Presiden Joko Widodo banyak mengerjakan proyek pembangunan di Papua, namun sayangnya minus perhatiannya pada persoalan utama hak asasi manusia. Bagian ini diungkapkan dalam buku ini pada Bab Sembilan. Maka masyarakat Papua mempertanyakan kepada Joko Widodo mengenai proyek pembangunan, sebenarnya pembangunan ini untuk siapa?

Dan bagian akhir dari buku ini ditutup dengan kesimpulan dan refleksi kritis. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang dari tahun ke tahun. Aparat keamanan tetap tercatat sebagai aktor dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan demi kekerasan telah menjadi budaya konflik berkepanjangan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan generasi baru Papua yang tumbuh, hidup dalam tekanan zaman konflik berkepanjangan dan berulang-ulang.

Buku ini membantu para pembaca untuk melihat secara benar bahwa pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan Tanah Papua masih saja terus terjadi. Buku ini kiranya mengingatkan Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jayapura, November 2018

Salam

Wilhelmus I. G. Saur, OFM
Direktur SKPKC Fransiskan Papua

Bab 1

**Layanan
Kesehatan Buruk:
Anak-anak
Terus Menjadi
Korban**



Kesehatan adalah hak asasi manusia. Setiap masyarakat dijamin dan punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Secara konstitusi, negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Masyarakat atau warga negara di Tanah Papua punya hak yang setara dengan wilayah lain di Indonesia. Namun, masyarakat Papua tak kunjung mendapatkan kesetaraan. Hampir tiap tahun, tragedi kesehatan terjadi di Tanah Papua.

Pemerintah sebenarnya mulai menunjukkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat, namun belum serius membangun sistem kesehatan di seluruh wilayah Tanah Papua (Papua dan Papua Barat). Munculnya peristiwa kesehatan yang buruk seakan membangunkan mimpi panjang pemerintah dan institusi kesehatan.



Seorang bayi yang dirawat di Puskesmas berada di pangkuan ibunya di Distrik Tiom, Lanny Jaya, Papua, 2017.
Foto: FX. Making/SKPKC Fransiskan Papua

TAHUN 2017 adalah tahun yang buruk bagi Papua, kasus kesehatan menerpa di beberapa daerah. Antara lain: kasus kematian anak-anak di sejumlah kampung di Kabupaten Deiyai, kasus kematian di Lanny Jaya, kasus kematian di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo, dan kasus sekitar 200 bayi yang terserang diare di Kabupaten Merauke.

Pada 31 Maret 2017, Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan Danius Puras berkesempatan mengunjungi Jayapura, Papua. Danius Puras diwakili oleh dua asistennya secara langsung mendengarkan informasi dan fakta terkait pelayanan kesehatan di Tanah Papua. Beberapa organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan pegiat kesehatan yang tergabung dalam sebuah koalisi menghadirkan para korban dan pelayan kesehatan untuk memberikan fakta dan kesaksian.

Kesaksian dimulai dari Kejadian Luar Biasa di daerah Mbua, Kabupaten Nduga, terungkap bahwa pelayanan kesehatan amat buruk; tidak adanya petugas kesehatan, stok obat-obatan yang terbatas dan tak layak konsumsi karena melewati ambang batas pakai. Lalu diungkapkan kematian anak-anak berusia di bawah lima tahun dan pemerintah daerah yang tidak siap dan mampu menyelesaikan kasus-kasus kematian anak-anak tersebut.

Sesudah pertemuan dengan utusan khusus PBB di bidang kesehatan itu, kasus kematian anak-anak terus berlangsung hingga akhir 2017. Kematian anak-anak ini meluas ke daerah Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Deiyai; tepatnya di empat kampung di Distrik Tigi Barat, dan Kabupaten Jayapura, yaitu di kampung Kwarja.

I. Kasus Kematian Anak-anak di Deiyai

Kasus kematian anak-anak di Kabupaten Deiyai meliputi beberapa kampung seperti Kampung Ayatei, Digikotu, Piyakedimi, Yinudoba dan Kampung Epanai, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai. Kematian anak-anak itu disebabkan oleh beragam penyakit.

Kasus-kasus kematian bayi tersebut terus bertambah jumlahnya karena tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pihak berwenang, Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan. Pemerintah membentuk tim untuk menangani kasus tersebut, tetapi bergerak lambat. Tim Kesehatan baru bergerak pada Juli 2017, enam bulan sesudah terjadi kasus kematian anak-anak Balita sejak Januari 2017. Tim Kesehatan terdiri dari petugas kesehatan di Distrik Tigi Barat, Satgas Kaki Telanjang, dan Dinas Kesehatan Deiyai.

Menurut dokter Selvius Ukago, Ketua Tim dari Dinas Kesehatan untuk kasus Deiyai, mengungkapkan temuan timnya bahwa kematian anak-anak Balita,

terhitung sejak Mei-Juni-Juli 2017 karena menderita sejumlah penyakit: ISPA, Diare, Malaria, Disentri, Cacingan, Pneumonia, Brongkiale dan Campak.¹

Data yang Berbeda

Jumlah kematian Balita di Deiyai pun bervariasi. Tim Dinas Kesehatan Deiyai mengeluarkan data jumlah anak-anak Balita yang meninggal sebanyak 31 anak. Sedangkan dari pihak Gereja Katolik Dekenat Paniai, Keuskupan Timika, Papua merilis jumlah orang yang meninggal sebanyak 50 orang, terdiri 43 anak-anak Balita, 6 orang dewasa, 1 orang tak disebut usianya.² Kemudian Tim Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengumpulkan informasi dan mengungkapkan data jumlah anak-anak Balita yang meninggal sebanyak 40 orang, belum diketahui secara jelas jenis virus penyebab kematian itu.

“Tim berjumlah sembilan orang. Tim terdiri dari dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan setempat. Menurut Yamamoto, virus yang menimpa warga di empat kampung tersebut dikabarkan menewaskan 40 bayi dan belum diketahui pasti jenis virusnya. Laporan ke kami ada 40 bayi meninggal akibat campak, nah kita akan ke sana hari ini, untuk memastikan dan memberikan perawatan kepada penderita di sana.”³

Temuan lapangan dari tim Gereja Katolik Dekenat Keuskupan Timika di Tigi Barat kiranya menjadi data yang cukup untuk mendalami kasus tersebut. Pastor Paroki Deiyai Pastor Damianus Adii, Pr menjelaskan gejala penyakit yang diderita oleh korban adalah tubuh panas tinggi, mencret, mulut luka-luka, mata merah dan tiba-tiba meninggal. Gejala penyakit itu berlangsung antara satu hingga empat hari.

“Tetapi, menurut pendataan kami kepada keluarga korban gejala tubuh pasien adalah panas tinggi, mencret (diare), mulut luka-luka, mata merah, dan tiba-tiba meninggal, waktu sakitnya satu hari sampai empat hari langsung meninggal dunia.” Demikian pernyataan Pastor Damianus Adii, Pr.⁴

1 Lihat <https://www.tabloidjubi.com/artikel-7755-kematian-lebih-30-balita-di-distrik-tigi-barat-akibat-7-jenis-penyakit.html> , diakses pada 19 Januari 2018

2 Lihat <https://www.tabloidjubi.com/artikel-7960-gereja-rilis-data-hampir-50-balita-meninggal-akibat-penyakit-di-tigi-barat.html>, diakses pada 19 Januari 2018

3 Lihat <http://kesmas-id.com/40-bayi-meninggal-dunia-di-deiyai-papua-terserang-wabah-sarampa/>, diakses pada 19 Januari 2018

4 Lihat <https://www.tabloidjubi.com/artikel-7960-gereja-rilis-data-hampir-50-balita-meninggal-akibat-penyakit-di-tigi-barat.html>, diakses pada 19 Januari 2018

Fasilitas Kesehatan yang Buruk

Topografi geografis daerah dimana Balita meninggal memungkinkan penularan virus campak. Misalnya di Kampung Wagomani dan Deimago, di akhir tahun 2016, ada kejadian serupa. Sekitar 15 orang meninggal dunia. Menurut keterangan seorang petugas Gereja Katolik setempat Melkias Giay, 15 orang yang meninggal dunia sebagian besar bayi, atau anak-anak Balita.⁵ Peristiwa ini tidak diberitakan ke publik oleh media.

Ada empat Puskesmas di Tigi Barat, yang terletak di Tenedagi, Ayatei, Gakokebo dan Wagomani. Namun, kondisinya tidak mendukung untuk diadakan pelayanan kesehatan. Adanya gedung atau bangunan puskesmas dianggap sudah selesai, padahal sarana atau tempat pengobatan itu semestinya dihidupkan dengan para tenaga medis seperti dokter atau pun perawat, dan dilengkapi dengan obat-obatan.

“Di kampung-kampung ada Pustu, tapi hanya gedung, tidak ada prasarana medis dan obat-obatan. Hanya klinik yang dikelola Gereja yang menyediakan layanan. Obat-obatan dan tenaga disediakan dari Gereja. Bangunan Pustu di kampung-kampung itu jadi kandang kambing dan babi.”⁶

Melkias Giay mengungkapkan pelayanan kesehatan belum menjadi prioritas program pemerintah untuk memberikan pelayanan hak-hak dasar masyarakat, seperti kesehatan. Ia mengungkapkan tahun 2016 lalu petugas-petugas kesehatan di Pustu dipindahtugaskan oleh Bupati Deiyai Dance Takimai secara serentak ke Satuan Polisi Pamong Praja. Ternyata, bukan hanya petugas kesehatan saja tetapi beberapa guru juga dipindahkan menjadi pegawai di bagian kesejahteraan DPRD Kabupaten Deiyai. Beni Ukago, yang telah menjadi guru beberapa tahun di tempat itu mengaku juga dipindahkan ke bagian logistik Badan Penanganan Bencana Daerah.⁷

Buruknya pelayanan kesehatan tersebut telah mempengaruhi minat masyarakat untuk pergi berobat ke fasilitas kesehatan setempat. Masyarakat lebih memilih berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Madi daripada ke RSUD Waghete – padahal jaraknya lebih jauh dan akses transportasinya lebih sulit.

5 Hasil wawancara Albertus Vebrianto (tim investigasi SKPKC FP) dengan salah satu petugas Gereja Katolik di Deiyai Melkias Giay.

6 *Ibid.*

7 Hasil wawancara Albertus Vebrianto (tim investigasi SKPKC FP) dengan Beni Ugako

Keterlambatan Bantuan Medis

Tim Medis dari Dinas Kesehatan baik Kabupaten, Provinsi maupun Pusat baru mengetahui peristiwa kematian ini pada Juli 2017. Kejadiannya sudah terjadi pada Januari 2017. Menurut Gereja Katolik Dekenat Pania, Keuskupan Timika, pelayanan kesehatan yang buruk yang terjadi di Deiyai, juga dialami oleh daerah-daerah lain di pedalaman Papua.

Menurut Melkias Giay, Pemerintah Deiyai sudah membangun Pustu di beberapa kampung, tetapi selama ini tidak ada kegiatan pelayanan medis. “Kami hanya melihat gedung saja, tidak ada prasarana medis dan obat-obatan, hanya yang ada di kampung-kampung adalah rumah Pustu tanpa pelayanan medis. Rumah itu menjadi kandang dan kotoran kambing dan babi.”

Pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, lupa dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah tidak mempedulikan kebutuhan mendasar tersebut. Sehingga, pemerintah seakan lumpuh, tak mampu bergerak menyelesaikan masalah kesehatan, karena selama ini infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat tidak dibangun dengan sungguh-sungguh.

Saat terjadi kasus-kasus berat, seperti kematian anak-anak Balita, para pemimpin daerah tak menunjukkan sikap respek yang tinggi dan tidak bergerak cepat menggerakkan berbagai instansi pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Memang, para petugas medis dan tokoh-tokoh publik pemerintahan datang ke kampung pasca kejadian terungkap. Namun, tidak melahirkan daya kerja dan mengubah secara nyata pelayanan kesehatan di masyarakat.

Bupati Deiyai Dance Takimai pun tampak tak menunjukkan niat yang serius menjadikan kasus kematian anak-anak itu sebagai momen perubahan mendasar bagi pelayanan kesehatan. Ia menyebut peristiwa kematian anak-anak itu sebagai musibah, artinya kejadian itu dipahami sebagai peristiwa di luar kendali manusia. Padahal, kasus-kasus itu bisa dicegah ketika roda sistem pelayanan kesehatan berjalan. Puskesmas hidup dengan hadirnya para perawat, dokter, dan kesediaan obat-obatan yang cukup. Program kesehatan, seperti imunisasi kepada anak-anak berjalan secara teratur.

II. Kasus Kematian di Lanny Jaya

“Saya punya Bapak sakit selama satu minggu. Bapak mulai mengalami batuk-batuk, sakit kepala dan seluruh badannya mengalami sakit hingga meninggal. Saya

ke Kota Tiom untuk beli obat, tapi obat itu tidak bisa sembuhkan saya punya bapak.”⁸

Billir Wanimbo menuturkan jelang kematian ayahnya, Tiber Wanimbo, yang didera sakit dan kesulitan mendapatkan pengobatan hingga nyawanya tidak tertolong, atau meninggal dunia.

Tiber Wanimbo adalah salah satu kasus kematian yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya pada akhir April 2017. Saat itu diberitakan oleh media lokal Papua sekitar 37 orang meninggal dunia di empat kampung Kabupaten Lanny Jaya.⁹ Kasus kematian tersebut disebabkan oleh berbagai penyakit.

Empat kampung itu adalah Kampung Indawa, Eyuni, Uragabur dan Tinggira, terletak tak jauh dari Tiom, pusat kota Kabupaten Lanny Jaya. Jaraknya antara kampung ke Tiom antara 1,5 kilometer hingga 3 kilometer, dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, lamanya antara 20-40 menit. Perjalanan lebih cepat dengan menggunakan motor. Meskipun jarak kampung ke kota nampak dekat, pelayanan kesehatan tetap menjadi persoalan. Berdasarkan laporan media pada Januari hingga Mei 2017 terdapat 37 kasus kematian, sementara laporan investigasi dari Tim Koalisi menyebut ada 19 kasus kematian.¹⁰

Temuan ini berdasarkan laporan dan data yang dihimpun Kepala Kampung Eyuni, Yarak Wenda. “Ada 19 orang yang meninggal dunia sejak Januari hingga 25 April. Saya lihat langsung di lapangan di Distrik Awina, Kabupaten Lanny Jaya.”¹¹

Kepala Kampung Eyuni Yarak Wenda mengatakan bahwa masyarakat di kampungnya sudah terserang penyakit itu sejak Januari 2017. Sebuah keluarga yang berjumlah lima orang, biasanya dua atau tiga orang mengalami sakit. Menurut pengakuannya, penyakit ini mulai menyerang penduduk di Kampung Indawa atau Umuwak lalu masuk ke Kampung Eyuni, Uragabur, Tinggira dan Nambume. Mereka mengalami sakit mencret kemudian meninggal dunia. Kasus itu dialami lima penduduk kampung Eyuni.

8 Hasil wawancara dengan Billir Wanimbo oleh tim koalisi (Frengki Making)

9 Lihat <http://www.tabloid-wani.com/2017/04/37-warga-meninggal-di-lanny-jaya-diduga-karena-langkahnya-air-bersih.html> dan <http://www.harianpapua.com/miris-37-orang-meninggal-di-lanny-jaya-karena-diare/>, diakses pada 19 Januari 2018 dan Cenderawasih Pos, Jumat 28 April 2017

10 Lihat Laporan Koalisi, masyarakat yang meninggal yang berasal dari 4 Kampung dengan total berjumlah 19 orang. Sedangkan di Kampung Indawa tidak ada korban jiwa yang meninggal. Nama-nama yang meninggal di Kampung Eyune: Aiman Wanimbo (24 thn), Nus Wanimbo (23 thn), Pendina Wanimbo (37 thn), Tulem Wanimbo (41 thn), Temegi Wanimbo (47 thn). Di Kampung Uragabur: Mar Wanimbo (38 thn), Mes Wenda, Pandina Wanimbo, Merry Wanimbo (35 thn), Enos Kogoya (43 thn). Di Kampung Tinggira: Tiber Wanimbo (33 thn), Digen Wanimbo (41 thn), Bato Wenda (39 thn), Sisa Wenda (37 thn), Pite Wanimbo (13 thn), Etemeliakwe Komba (38 thn), Tayampam Wanimbo (39 thn), Umbinus Wanimbo (36 thn), Jubiter Wanimbo (41 thn).

11 Pernyataan Kepala Suku Besar Wilayah Lanny Jaya Areki Wanimbo ketika diwawancari oleh tim investigasi koalisi kesehatan untuk Lanny Jaya (Frengki Making).

Kepada Tim Koalisi Investigasi untuk Lanny Jaya, Yarak Wenda mengungkapkan tim medis atau tenaga kesehatan datang mengunjungi kampung-kampung dan mengobati masyarakat yang terserang penyakit pada 20 April 2017. Saat itu Kepala Distrik Awina memerintahkan untuk membangun posko kesehatan di Puskesmas Distrik Awina di Indawa, yang jaraknya antara 1-4 kilometer dari kampung-kampung tersebut. “Ada beberapa masyarakat yang sakit dan tidak bisa berjalan jauh ke Puskesmas. Padahal jalan masuk ke kampung-kampung sudah dibangun dan semua jenis kendaraan bisa ke lokasi. Kami kecewa karena pelayanan medis kepada masyarakat tidak optimal.”¹²

Dari pernyataan Kepala Kampung Yarak Wenda diketahui bahwa kampung-kampung yang terkena musibah ternyata bisa dijangkau oleh petugas medis. Hal ini menunjukkan buruknya pelayanan kesehatan bukan disebabkan akses wilayah yang tak bisa dijangkau, namun tidak berjalannya pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Dari data yang dihimpun oleh tim investigasi kematian penduduk di empat kampung itu telah berlangsung sejak Januari 2017 dan bukan terjadi saat kematian di Lanny Jaya diberitakan oleh media lokal.

Menurut Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Sohilait seperti disampaikan kepada media lokal *Tabloidjubi.com* bahwa masyarakat yang terserang diare disebabkan mengonsumsi air tadah hujan yang ditampung, yang tercampur dengan kotoran binatang dan manusia, tanpa dimasak sebelum dikonsumsi.

Pernyataan Christian Sohilait itu berbeda dengan keterangan dari Yutin Wanimbo, warga dari Kampung Eyune, bahwa air yang mereka minum bukan dari air tadah hujan tetapi air yang mengalir dari pegunungan. Menurutnya penduduk sudah bertahun-tahun mengonsumsi air yang mengalir dari pegunungan dan tidak menyebabkan terserangnya berbagai penyakit yang muncul seperti kasus-kasus kematian pada saat ini.

“Untuk minum kami timba air dengan jerigen. Air itu kami ambil di kali, jaraknya sekitar 20 meter dari honai (rumah). Air itu keluar dari mata air pegunungan,” kata Yutin Wanimbo.

Kemudian kasus penyakit lain adalah dialami oleh kakak dan adik, Etis Wenda, usia 7 tahun, yang mengalami sakit hingga tiga minggu. Etis telah mendapatkan pengobatan dari Mantri Jesman Wanimbo, tenaga kesehatan di kampung itu, namun kondisinya belum berubah. Sementara adiknya, Etias Wenda, usia 4 tahun, mengalami sakit dua minggu; badannya kurus, setelah beberapa hari sakit ia tidak bisa mendengar.

¹² Pernyataan Kepala Kampung Eyuni, Yarak Wenda ketika diwawancari tim investigasi koalisi kesehatan untuk Lanny Jaya (Frengki Making).

Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya sesungguhnya telah terbangun. Wilayah ini bukanlah daerah terisolasi dan tertutup. Setidaknya, itu diketahui dari profil kesehatan kabupaten ini.

Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Lanny Jaya mengeluarkan profil, potret dan peta tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya. Informasi ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk mengukur sejauh mana pelayanan kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya pada umumnya dan khususnya di beberapa kampung yang mengalami kasus-kasus kematian, yaitu Kampung Indawa, Eyune, Uragabur dan Kampung Tinggira.

Pada profil kesehatan Lanny Jaya tergambar bahwa letak geografis atau medan pelayanan masih menjadi salah satu faktor ketidakberdayaan petugas medis untuk menjangkau dan melayani masyarakat. Lalu Tim Investigasi Koalisi untuk Kesehatan Lanny Jaya mengungkapkan bahwa jarak tempuh masyarakat ke pusat layanan kesehatan cukup jauh. Masyarakat yang sedang sakit tidak mampu menempuh dan menjangkau pos-pos kesehatan yang telah dibangun.

Menurut Profil Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya, jumlah pusat layanan kesehatan masyarakat sebagai berikut: 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 10 Puskesmas tersebar di Distrik, 39 Pustu, 45 Polindes, 10 Poskedes, 142 Posyandu, 44 Balai Pengobatan dan 23 Pos Obat Desa.¹³

Bagaimana dengan kehadiran tenaga medisnya? Dengan jumlah fasilitas yang ada, rasio kehadiran tenaga medis sangatlah minim. Rasio kehadiran (jumlah) petugas medis di 10 Puskesmas di Lanny Jaya adalah dokter umum berjumlah 10 dokter, 1 dokter gigi, 34 bidan, 88 perawat, 1 orang ahli Gizi, 2 orang SMAK, Kesehatan masyarakat sebanyak 2 orang, dan tenaga non kesehatan berjumlah 63 orang. Sedangkan rasio kehadiran dokter di Lanny Jaya adalah di Tiom (3 orang), Tiomneri (1 orang), Prime (1 orang), Gamelia (1 orang), Poga (1 orang) dan Makki (1 orang).¹⁴ Sedangkan di Puskesmas lainnya tidak ada tenaga dokter.

Keluar dari Krisis Kesehatan

Terganggunya sistem kesehatan masyarakat telah memakan banyak korban dan menyebabkan kematian. Tidak berfungsinya sistem kesehatan yang telah dibangun secara maksimal telah merugikan masyarakat, yang memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak.

¹³ Lihat Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Lanny Jaya 2015

¹⁴ Lihat Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Lanny Jaya 2015

Kasus kematian yang dialami oleh warga pada kampung-kampung di Distrik Awina, Kabupaten Lanny Jaya merupakan kegagalan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, yang diberikan mandat dan wewenang dalam menjamin hak-hak kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya gagal menghidupkan roda dan sistem kesehatan bagi masyarakat.

Dalam beberapa kasus kematian massal di sejumlah tempat sebagaimana disebutkan di atas, kita menemukan bahwa tanggapan yang diberikan pemerintah tidak lebih hanya sekedar reaksi sesaat. Pemerintah tidak siap merespon kasus-kasus kesehatan, baik tindakan pencegahan maupun penyelesaian kasus-kasus secara cepat. Sering pemerintah lambat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kesehatan yang berujung pada kematian.

Dalam situasi dan kondisi krisis, semestinya Pemerintah segera bertindak dan mengerahkan tenaga-tenaga medisnya. Namun, komitmen tersebut belum muncul. Bahkan pada kasus-kasus kematian berulang, pemerintah bergerak setelah mendapatkan ekspos dari media, dan kembali meredup seiring perhatian media tak lagi menyentuh kasus tersebut.

Pemerintah, khususnya, Dinas Kesehatan setempat harus bekerja keras dan mengubah pola kerja dan cara pandang dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan harus menggerakkan berbagai pihak untuk melakukan aksi nyata dalam pencegahan. Pihak-pihak ini secara teratur dan berkelanjutan melakukan pendidikan dan penyadaran tentang pola hidup sehat.

Kasus-kasus kematian massal di sejumlah tempat pada 2017 tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Masyarakat belum menyadari tentang pemenuhan gizi yang baik melalui makanan-makanan yang dikonsumsi. Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang kandungan gizi makanan untuk kesehatan.

Kasus Asmat, misalnya, kebiasaan hidup berpindah-pindah dan tinggal dalam “bevak” yang seadanya tidak secara langsung memudahkan virus atau penyakit menyerang mereka. Begitu pun dengan persoalan air yang diminum juga kurang memperhitungkan kebersihannya. Praktik-praktik dan perilaku dalam kehidupan dan situasi alam itulah yang mestinya mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang peduli dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Para pihak tersebut harus turun ke kampung-kampung memberikan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Sekali lagi, pelayanan kesehatan di kampung-kampung, adalah menjadi prioritas dan kepedulian besar harus dijalankan untuk mengatasi kasus-kasus kematian berulang, yang semestinya bisa dicegah dan diobati. Kasus kematian di Samenage,

misalnya, ditemukan bahwa penyakit yang mereka derita bukan penyakit yang tidak bisa diobati, melainkan penyakit biasa (flu, batuk, sakit perut). Akan tetapi penyakit biasa ini menjadi luar biasa dan menyebabkan kematian karena tidak adanya petugas kesehatan yang memberikan pengobatan.

Kasus-kasus kematian yang terjadi pada 2017 sebenarnya memiliki pola yang sama atau paling tidak mirip. Maka, sudah tidak bisa diam lagi, para pihak untuk bekerja nyata membangun sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman.

REKOMENDASI

Pemerintah Pusat; Kementerian Kesehatan

1. Membuat program kerja prioritas kesehatan di Tanah Papua dan membangun secara nyata jaringan keamanan kesehatan di daerah-daerah rawan dan di kawasan pedalaman Papua.
2. Menciptakan sistem tanggap darurat yang cepat dan tepat di daerah- daerah yang rawan dengan wabah dan serangan penyakit menular.
3. Membangun fasilitas kesehatan yang layak dan memenuhi standar-standar medis; pusat layanan kesehatan, tenaga kesehatan (dokter, perawat, petugas non-perawat), yang dekat kawasan pemukiman dan mudah diakses.
4. Memfasilitasi dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tenaga-tenaga kesehatan lokal melalui pendidikan dan berbagai pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kondisi di Papua.

Pemerintah Daerah; Provinsi dan Kabupaten

1. Pemerintah Papua: Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten membangun sistem keamanan tanggap darurat di bidang kesehatan, yang terhubung dan tersistem dari berbagai pihak di daerah-daerah pedalaman dan pusat pemerintahan: dari tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi.
2. Pemerintah Papua: Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten melakukan program pemantauan terhadap situasi kesehatan di semua daerah secara keberlanjutan dan pengawasan petugas-petugas kesehatan di lapangan.
3. Pemerintah Papua: Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten segera mengubah sistem tanggap darurat kesehatan lebih cepat. Ini untuk memperbaiki respon dari pengaduan masyarakat yang masih lambat.
4. Pemerintah Papua bekerjasama dengan masyarakat atau pegiat kesehatan untuk secara berkelanjutan memberikan penyadaran terkait pentingnya kesehatan di

masyarakat.

5. Pemerintah Papua (Dinas Kesehatan) menyediakan dan memeriksa fasilitas kesehatan dan obat-obat di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu agar mutu dan kelayakannya tetap terjaga.
6. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten bekerja lebih aktif dan keras lagi menghidupkan program vaksinasi dan imunisasi pada anak-anak secara merata, terlebih di daerah-daerah pedalaman dan terpinggirkan dari jangkauan pelayanan kesehatan.

Masyarakat

1. Lebih peduli dan membangun kesadaran di dalam komunitas-komunitas tentang pentingnya menjaga dan memperhatikan hidup sehat.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjaga kebersihan lingkungan, baik tingkat keluarga maupun kampung.
3. Masyarakat bekerjasama dengan pihak pemerintah (Dinas Kesehatan) dalam membangun dan memajukan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah.
4. Masyarakat harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para tenaga medis yang bertugas di wilayahnya.
5. Masyarakat lebih giat peduli dan memantau kegiatan dan kondisi pelayanan kesehatan, untuk memastikan pelayanan kesehatan di daerah-daerah berjalan dengan baik.

Organisasi Masyarakat Sipil

1. Mengkampanyekan lebih besar lagi tentang hidup sehat di masyarakat
2. Meneliti dan mengumpulkan informasi dan data kawasan pemukiman dan wilayah yang masuk dalam zona kesehatan yang buruk, sulit diakses.
3. Melakukan riset-riset berkala untuk memetakan jaringan kesehatan masyarakat; infrastruktur kesehatan, tenaga medis, dan pelaksanaan operasional.
4. Memperbesar kampanye peningkatan kualitas dan standar kesehatan terhadap orang-orang asli Papua terutama di daerah pedalaman dan rawan dengan kasus-kasus kesehatan yang mengancam keselamatan penduduk.

Media Massa

1. Mengungkap situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Papua.
2. Menyajikan fakta secara lengkap mengenai berbagai fenomena kesehatan yang berdampak luas bagi situasi sosial kesehatan masyarakat.

3. Memperbanyak liputan atau reportase lapangan yang mengungkap berbagai isu kesehatan yang terjadi di daerah-daerah.
4. Mengungkap isu-isu kebijakan publik terkait praktik-praktik pelayanan kesehatan masyarakat.

Bab 2

**HIV AIDS:
Orang Papua
dalam Bahaya
dan Stigma**



Kasus HIV AIDS terus tumbuh di Tanah Papua. Penyebarannya amat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan hidup bangsa Papua. Beberapa dekade menjadi ancaman paling buruk bagi penduduk di Tanah Papua.

Namun, data kasus yang dilaporkan meningkat tiap tahun tak juga menghentakan bangsa Papua bangkit bergerak melawannya. Gerakan perlawanan HIV AIDS belum juga menjadi sebuah pergerakan besar yang menghadang virus yang menyebabkan satu demi satu orang Papua meninggal dunia.

Gerakan 'Stop Sudah HIV AIDS!' harus dibangkitkan setelah sekian tahun senyap. Agar lonceng kematian generasi Papua karena HIV AIDS lambat laun menjauh. Harus dilahirkan gebrakan dan gerakan sistemik untuk membebaskan generasi Papua dari ancaman buruk HIV AIDS.

Kasus HIV AIDS Papua dan Papua Barat

KASUS HIV AIDS di Tanah Papua terus melambung jumlahnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua melaporkan kasus HIV AIDS hingga 31 Desember 2017 jumlahnya mencapai 32.263 kasus, dari jumlah itu kasus sebanyak 11.828 kasus HIV dan 20.435 kasus AIDS.

Menurut jenis kelaminnya kasus HIV yang dialami laki-laki sebanyak 5.303 orang dan perempuan berjumlah 6.563 orang, sementara sebanyak 62 orang tidak diketahui. Lalu kasus AIDS terdiri 10.345 orang laki-laki dan sebanyak 10.055 perempuan, 35 orang tidak diketahui.

Dari penyebaran wilayahnya, Dinas Kesehatan melaporkan HIV dan AIDS menyebar hampir di daerah-daerah Provinsi Papua, hanya ada beberapa kota yang tercatat nol, seperti Asmat, Dogiyai, Mamberamo Raya, Nduga, Sarmi, dan Yalimo.

Kasus tertinggi untuk HIV terdapat di Mimika yang berjumlah 2801 kasus dan Nabire yang jumlahnya mencapai 2207 kasus. Sementara Kabupaten Jayawijaya ada 1484 kasus, Kota Jayapura sebanyak 1301, dan Kabupaten Jayapura sebanyak 1220 kasus, lalu Merauke sebesar 1039 kasus.

Kemudian untuk kasus AIDS, jumlah tertinggi terjadi di kota Jayapura yang jumlahnya mencapai 4061 orang, Kabupaten Jayawijaya berjumlah 3809 kasus, dan Nabire sebesar 3716 orang. Lalu Mimika berjumlah 2493 orang, kabupaten Jayapura mencapai 1536 dan Biak sebesar 1497 orang, serta Merauke sebanyak 1031 orang.

Bila kasus HIV dan AIDS digabung jumlahnya maka penduduk di beberapa kota ini jumlahnya sangat besar, masing-masing sekitar 5000 lebih; Nabire sebanyak 5923 warga, Kota Jayapura berjumlah 5362 warga, Kabupaten Jayawijaya berjumlah 5293 warga dan Mimika sebanyak 5294 warga.

Untuk kasus di Kabupaten Jayawijaya, Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanes Walilo saat bertemu dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jayawijaya, mengungkapkan kasus HIV AIDS terus meningkat selama 2016-2017 mencapai 6.300 kasus.¹⁵

Sementara itu daerah Nabire terus terpantau penyebaran semakin tinggi. Menurut data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kabupaten Nabire menjadi urutan pertama dalam peringkat jumlah kasus HIV dan AIDS yang mencapai 5923 kasus. Mereka yang sudah meninggal akibat kasus ini adalah 316 orang.¹⁶ Kabupaten Nabire menggeser Kabupaten Mimika dari urutan pertama yang

15 Lihat. <http://tabloidjubi.com/m/artikel-9833-angka-penderita-hivaidis-di-jayawijaya-tembus-6300.html>, diakses pada 7 Februari 2018

16 Lihat Data HIV AIDS Per-31 Desember 2017 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua

berjumlah 5294 kasus HIV AIDS dan yang meninggal berjumlah 170 orang.¹⁷

Pada tahun 2017, dari 32263 kasus HIV dan AIDS, dilaporkan atau tercatat sebanyak 1900 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut angka kematian paling tinggi terletak di Jayawijaya sebanyak 400 orang.

Menyimak data-data HIV AIDS itu Provinsi Papua tetap menjadi daerah zona merah bagi pertumbuhan HIV AIDS. Perkembangan tersebut mengkhawatirkan, tetapi ada sisi positif, bahwa penyebaran HIV AIDS telah terdeteksi lebih baik lagi. Menurut salah satu pendamping ODHA dan Narkoba, Stefanus Araw, hal itu menandakan kesadaran masyarakat terhadap HIV AIDS lebih besar. “Kalau jumlah ODHA semakin banyak ditemukan itu berarti membantu kita untuk menangani kasus itu. Kita bisa tahu secara baik jumlah ODHA di setiap wilayah dan mendampingi mereka dengan baik sehingga tidak menyebarkan virusnya itu.”¹⁸

Lalu, bagaimana dengan kasus HIV AIDS di provinsi Papua Barat? Kasus HIV AIDS di provinsi Papua Barat pada 2017 mulai terpantau. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mulai melaporkan kasus HIV AIDS yang menyebar di beberapa wilayahnya, meski diakui data yang dilaporkan belum mencakup semua daerah karena keterbatasan sumber daya manusia yang bekerja dalam menghimpun informasi atau data kasus-kasus HIV AIDS.

Dalam laporan Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2017 dilaporkan jumlah kasus HIV AIDS di provinsi tersebut tidak pasti karena tidak memiliki sistem pencatatan dan koordinasi yang baik dalam pelaporan data tersebut. Jumlah kasus HIV AIDS dihimpun berdasarkan laporan Profil Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten yang dipublikasikan dalam Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2017 masih belum jelas menyebut jumlah sesungguhnya dari kasus HIV dan AIDS pada 2017.¹⁹

Namun ketika tim SKPKC menelusuri kasus HIV AIDS di Papua dan Papua Barat dalam konteks nasional, menemukan laporan yang dihimpun dan dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan yang diolah oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Pada 2017 kasus baru yang dilaporkan oleh Provinsi Papua Barat hingga Desember 2017 adalah sebanyak 409 orang terinfeksi HIV, jumlahnya menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 530 orang dan terungkap sepanjang satu

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Pendamping ODHA dan Narkoba Stef Araw di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Rabu, 27 September 2017

¹⁹ Data jumlah kasus yang dipublikasikan dalam laporan tersebut terjadi perbedaan dalam narasi dan grafik yang ditampilkan. Disebutkan data jumlah AIDS di Provinsi Papua Barat pada 2017 mencapai 741 orang dan ada 426 kasus kematian karena AIDS. Lihat, Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat 2017, hal.41-42. Sementara di bagian lain disebutkan total 120 kasus HIV dan 164 kasus AIDS dan ada 108 kasus kematian karena AIDS. Lihat, *Ibid.*, hal. 68-69.

dekade lebih, antara 2009-2017 yang dijumlah secara kumulatif di Papua Barat terdapat sekitar 4.585 orang terinfeksi HIV.²⁰

Kemudian provinsi Papua, menurut data tersebut, dilaporkan jumlah kasus baru yang terinfeksi HIV sekitar 4.358 orang pada 2017, jumlah ini meningkat dari kasus HIV pada 2016 sekitar 3.866 orang. Total jumlah kumulatif dalam satu dekade lebih, dari 2009 hingga Desember 2017, ada sekitar 29.083 orang dengan HIV. Data itu juga menyebutkan provinsi Papua berada di posisi ke-5 dari 10 provinsi yang melaporkan jumlah HIV terbanyak pada Oktober-Desember 2017.²¹ Posisi pertama Jawa Timur, selanjutnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan keempat Jawa Barat.

Data terkait AIDS, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI mempublikasikan jumlah AIDS yang dilaporkan oleh provinsi Papua hingga pada 2017 berjumlah 804 kasus baru, jumlah ini menurun dibandingkan 2016 yang jumlahnya mencapai 1.584 orang. Total keseluruhan atau jumlah kumulatif dari 2009 hingga 2017 penderita AIDS di Papua berjumlah 19.729 orang. Dan diketahui laporan tiga bulan terakhir, Oktober-Desember 2017, dari 10 provinsi yang melaporkan jumlah AIDS terbanyak, Papua berada diperingkat ketiga, sementara posisi pertama wilayah Jawa Tengah dan kedua provinsi Jawa Barat. Lalu pada 2017 dan 2016 provinsi Papua Barat tak melaporkan penderita AIDS, sehingga jumlahnya tidak diketahui persis. Namun, tercatat laporan kumulatifnya sejak 2009 hingga 2017 terdapat 1.741 orang yang sudah terkena AIDS.²²

Merawat ODHA, Melawan Stigma

Perjuangan HIV AIDS, selain persoalan medis, harus melawan stigmatisasi yang masih melekat kuat. Menekan angka pertambahan dan peningkatan kasus HIV AIDS terus digerakan, perjuangan juga melalui narasi melawan stigma-stigma di kalangan masyarakat.

Salah satu potret perjuangan menghadapi stigma sekaligus mengobati orang-orang yang terkena HIV AIDS terlihat dalam Rumah Surya Kasih di Waena, Jayapura, Papua. Rumah Surya Kasih, atau yang sering dikenal hospis, sebuah tempat perawatan dan tinggal bagi para penderita HIV AIDS.

20 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), Kementerian Kesehatan RI, "Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS dan PIMS di Indonesia, Januari-Desember 2017", terbit Maret 2018, hal.8.

21 *Ibid.*, hal.9.

22 *Ibid.*, hal.16



Peta wilayah asal penderita HIV AIDS di Papua yang dilayani Rumah Surya Kasih. Foto: Basilius Triharyanto

Rumah Surya Kasih ini dikelola oleh Persaudaraan Fransiskan Papua sejak tahun 2007.²³ Rumah ini bisa menampung antara 12-14 orang. Menurut Kepala Pengelola Rumah Surya Kasih, Br. Agus Adil, OFM, sejak tahun 2007 – 2018, telah merawat dan mengobati sekitar 400 lebih penderita HIV AIDS. Dari jumlah tersebut, sebagian dikembalikan kepada keluarganya untuk perawatan jalan, sebagian ada yang meninggal dunia. Jumlah yang dirawat hingga meninggal dunia di Rumah Surya Kasih berjumlah sekitar 200 orang.²⁴

Menurut Br. Agus Adil, OFM, sebagian besar pasien HIV AIDS berasal dari pedalaman atau pegunungan Papua. Mereka datang dalam berbagai kondisi, tak jarang sudah parah, tapi ada juga yang masih permulaan. Para pasien yang dibawa ke Rumah Surya Kasih diperiksa lebih dulu di Rumah Sakit Dian Harapan, Waena, Jayapura. Usianya beragam, dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan.²⁵

23 Rumah Surya Kasih Waena merupakan salah satu unit pelayanan Para Saudara Fransiskan Papua bagi ODHA. Unit pelayanan ini mulai bergerak pada Maret 2007. Dalam perjalanan 2007-2009 karena banyak ODHA yang ditampung, maka Persaudaraan Fransiskan Papua mendirikan sebuah bangunan yang lebih luas dan lengkap pada 19 Agustus 2009 hingga saat ini.

24 Wawancara dengan Bruder Agus Adil, OFM di Rumah Singgah Surya Kasih Waena, Selasa, 26 September 2017

25 Wawancara Bruder Agus Adil, OFM di Rumah Surya Kasih, Waena, Jayapura pada 27 Agustus 2018.



Penderita HIV AIDS yang menjalani terapi pengobatan dan perawatan di Rumah Surya Kasih, Waena, Jayapura. Foto: Basilius Triharyanto

Rumah Surya Kasih didukung oleh tenaga perawat dan juru masak. Perawat inilah yang mendampingi dan melayani pengobatan, sementara seorang juru masak menyiapkan makanan secara layak untuk mendukung gizi dan kesehatan tubuh para pasien.

Orang-orang di sekitar penderita HIV AIDS ini menghadapi tantang yang tidak ringan, salah satunya melawan stigma negatif dan mitos atau pengetahuan yang keliru tentang penderita HIV AIDS. Salah satu perawat di Rumah Surya Kasih menuturkan kesaksian menghadapi stigma buruk dengan HIV AIDS. Berikut penuturan Cornelia Wandri, seorang perawat yang telah bekerja dua tahun merawat pasien HIV AIDS. Ia tinggal dan hidup satu atap dengan orang-orang HIV AIDS.²⁶

Menurut Wandri, hidup bersama dengan orang-orang HIV/AIDS itu perjuangan. Ia tak hanya tinggal dengan orang-orang yang berjuang melawan HIV AIDS, tetapi ia sendiri juga berjuang melawan pandangan buruk dan diskriminasi.

Wandri harus menghadapi pertentangan dari keluarga, teman-teman, bahkan teman terdekatnya sekalipun, yang tidak menerima ia bekerja dan tinggal bersama dengan para penyintas HIV/AIDS. Stigma buruk itu datang karena orang tidak mengerti dan tahu mengenai penyakit HIV.

“Mereka pikir penularannya kalau tinggal sama-sama. Mereka pikir saya sudah tertular. Maka saya perlahan-lahan menjelaskan keadaan di sini, saudara-saudara saya di sini seperti apa. Pelan-pelan keluarga bisa menerima dengan pekerjaan saya seperti ini,” kata Wandri.

Wandri ditolak oleh teman-teman perawat seangkatan yang bekerja di rumah sakit ataupun klinik. Teman-teman mengira bahwa dirinya telah positif HIV/AIDS. “Kok kamu bisa bekerja seperti tempat ini. Tempat itu kan berbahaya. Saya bilang ini bukan karena cita-cita saya tapi ini panggilan saya. Saya bisa melayani sesama saya. Saya bisa merasakan mereka yang tersisih.”

“Sekarang teman-teman saya menjauhi saya, seperti tidak kenal. Mungkin mereka takut,” kata Wandri.

Ia menerima banyak sindiran dari teman-temannya. Ia dianggap positif HIV/AIDS. Namun Wandri tak patah arang. Ia terus bekerja. Tuduhan dari teman-temannya ia terima dengan lapang dada. “Saya bilang itu sudah saya dengan Tuhan yang tahu. Terserah kalian di luar sana, yang penting apa yang saya bisa kerjakan, saya terus kerjakan. Saya di sini untuk melayani.”

26 Wawancara dengan Cornelia Wandri di Rumah Surya Kasih, Waena, Jayapura oleh Basilius Triharyanto, pada 29 Agustus 2018.

REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Daerah: Gubernur, Bupati

1. Melakukan gerakan nyata yang lebih besar dan cepat dalam program pencegahan, penghentian penyebaran dan peningkatan HIV-AIDS
2. Menciptakan sistem dan strategi yang solid dan efektif melalui pembentukan tim-tim khusus penanganan HIV-AIDS di luar lembaga yang sudah terbentuk.
3. Menetapkan HIV-AIDS sebagai situasi darurat kemanusiaan karena telah menjadi ancaman besar bagi kehidupan masyarakat Papua.
4. Meningkatkan sumber daya baik tenaga dan dana untuk tim-tim penanganan HIV AIDS yang sudah ada dan bagi pembentukan dan penambahan tim-tim penanganan yang baru di daerah-daerah yang belum terpantau dan membutuhkan.
5. Memperbanyak posko-posko dan tempat-tempat pemeriksaan dan perawatan HIV AIDS.

Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS

1. Meningkatkan gerakan kampanye pencegahan dan perawatan HIV AIDS lebih luas dan terbuka.
2. Meningkatkan pencegahan dan pengobatan dengan memperbanyak monitor, pengawasan, ke masyarakat langsung, terutama kelompok dan komunitas yang belum dijangkau dan aksesnya masih tertutup.
3. Meningkatkan program pemeriksaan masyarakat untuk HIV dan AIDS.
4. Meningkatkan fasilitas kesehatan khusus HIV-AIDS di seluruh wilayah dari berbagai tingkatan di Papua dan Papua Barat.
5. Memperluas dan memperkuat jaringan pelayanan kesehatan HIV AIDS dengan masyarakat dan komunitas-komunitas pendamping dan gerakan anti HIV AIDS dan gerakan-gerakan lain yang terkait.

Tokoh Gereja, Pendidik, Media, Musisi, Pekerja Profesional

1. Meningkatkan gerakan dan kampanye pemeriksaan HIV AIDS kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pelatihan, diskusi, workshop, kampanye, dan kegiatan-kegiatan terkait HIV AIDS di komunitas-komunitas; sekolah, gereja, pekerja rumah tangga, buruh, pekerja profesional, pelajar dan mahasiswa, aparat sipil negara, kepolisian, militer.
3. Membuat kegiatan, event, lagu, iklan, dan produk-produk kreatif lain untuk

- mengkampanyekan lebih keras dan luas lagi gerakan melawan HIV AIDS.
4. Media lebih banyak lagi menulis dan membuat laporan-laporan jurnalistik terkait isu-isu, kasus, narasi perlawanan terhadap HIV AIDS.

Bab 3

Pembungkaman Ruang Kebebasan Berekspresi



TAHUN 2017, suara menuntut keadilan di Tanah Papua mendapatkan rintangan dari aparat keamanan. Protes atau pun aksi demonstrasi damai dibubarkan paksa dengan kekerasan. Ini tindakan aparat menutup rapat suara-suara dan pendapat tentang berbagai situasi yang terjadi di Tanah Papua.

Di depan publik atau masyarakat luas, aparat keamanan menunjukkan kekuatan yang berlebihan, melalui dengan senjata, water canon, dan menghadirkan jumlah aparat keamanan yang berlebihan. Tindakan yang ditunjukkan adalah mengepung, mensweeping, memukul, dan melakukan tindakan kekerasan lain disertai dengan reaksi rasis dan diskriminatif terhadap orang-orang atau mahasiswa Papua.

Mahasiswa di tanah rantau di Jawa, Sulawesi, dan daerah lain dikekang, diblokade, dan dibuat tak bergerak di pos-pos kumpul massa, seperti di asrama dan titik-titik kumpul lain di masing-masing kota studi. Berbagai upaya dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua dengan tujuan tidak melakukan demonstrasi dan menyuarakan pendapat dan aspirasi persoalan Papua.

KOTA Yogyakarta memulai cerita suram pembatasan kebebasan pendapat mahasiswa-mahasiswa Papua pada awal tahun 2017. Pada 27 Januari 2017, sekelompok mahasiswa Papua di Yogyakarta yang berhimpun dalam Solidaritas untuk Dogiyai menggelar aksi protes damai.²⁷ Namun, saat massa aksi akan memulainya menuju kota Yogyakarta, aparat keamanan telah memblokir jalan dan mengepung Asrama Kamasan Yogyakarta, tempat berkumpul massa aksi. Selain pengepungan Asrama Kamasan dengan kekuatan kepolisian yang berlebihan, aparat keamanan juga bertindak represif dan sempat terjadi bentrok antara massa dan aparat keamanan. Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Kota Yogyakarta Abbi Douw melaporkan sebanyak tiga mahasiswa dipukul, diseret, dan diangkut ke dalam truk atau mobil kepolisian Polda Yogyakarta. Tiga mahasiswa itu: Ansel Gobay, John Gobay, dan Yuli Waine, mengalami luka-luka akibat pemukulan tersebut.

Pada Maret 2017 pengepungan dan pembatasan demonstrasi damai kembali dilakukan oleh aparat keamanan di sejumlah kota di pulau Jawa; Malang, Yogyakarta, Semarang, juga di kota Ternate. Demonstrasi damai itu dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia West Papua pada 3 Maret 2017, yang menyuarakan dukungannya kepada negara-negara Pasifik yang membahas persoalan hak asasi manusia Papua di Sidang Dewan HAM PBB. Selain menghadapi aparat keamanan, aksi di kota Malang harus berhadapan dengan kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas).²⁸

Aparat keamanan membungkam aksi-aksi demonstrasi damai itu memakai alasan bahwa aksi tersebut memuat atau mendukung penentuan nasib sendiri atau referendum. Aparat keamanan tetap melarang aksi demonstrasi, meskipun telah melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Salah satunya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Front Mahasiswa Tutup Freeport, yang ditolak atau tidak diizinkan oleh Polda Papua, menurut Koordinator Aksi Nelius Wenda karena di dalam surat pemberitahuan tersebut memuat poin atau tuntutan tentang penentuan nasib sendiri bagi Papua.²⁹

Isu-isu politik penentuan nasib sendiri dan sejarah Papua dinilai sensitif bagi pemerintah Indonesia. Melalui aparat keamanan, aksi-aksi demonstrasi damai yang menyuarakan isu-isu hak asasi manusia dan sejarah politik Papua sering kali mendapatkan tekanan keras. Pada Agustus 2017, digelar aksi serentak demonstrasi damai yang menyuarakan pelurusan sejarah yang dianggap sebagai salah satu akar persoalan pelanggaran hak asasi manusia Papua, menggugat Perjanjian New

²⁷ Lihat Tabloid Jubi, 30 Januari 2017

²⁸ Lihat <http://tabloidjubi.com/artikel-4229-fri-west-papua-dan-amp-aksi-di-7-kota-dukung-7-negara-pasifik-di-dewan-ham-pbb.html>, diakses pada 3 Oktober 2018

²⁹ Lihat Tabloid Jubi, 6 April 2017

York atau New York Agreement. Aksi serentak di beberapa tempat di Indonesia berlangsung pada 15 Agustus 2017. Berdasarkan pantauan Tabloid Jubi Papua, semua aksi di Tanah Jawa digagalkan dan dibubarkan oleh Ormas yang pro NKRI dan aparat keamanan.³⁰ Di Kota Semarang, sebanyak 47 orang massa aksi dan pendamping hukumnya, dibawa dan ditahan di Polresta Semarang. Di Kota Yogyakarta, sebanyak 29 orang massa aksi ditahan sebelum menggelar aksinya. Di Kota Malang, sekitar 30 orang dihadang oleh Ormas Pemuda Pancasila dan GM FKPPI.³¹

Pembungkaman dan pembatasan terhadap demonstrasi damai tak menyurutkan atau menghentikan para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Pada penghujung tahun 2017, kelompok mahasiswa di beberapa kota studi dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua melakukan aksi damai menolak deklarasi Trikora yang diumumkan pada 19 Desember 1961.³² Aksi ini tersebar di kota Jakarta, Bali, Bogor, Salatiga, Solo, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Malang, Manado, dan Ternate. Aksi di Kota Malang mendapat perlawanan dan dikepung oleh pihak kepolisian dan Ormas di Kota Malang. Akibatnya terjadi kericuhan. Sekitar 66 orang massa aksi dikepung, enam orang demonstran mengalami luka-luka. Sementara itu di kota Ternate, aksi demonstrasi damai dilarang oleh pihak kepolisian dengan tidak menerbitkan surat pemberitahuan aksi.

Pembatasan dan berbagai tindakan pelarangan terhadap penyampaian kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh aparat keamanan dan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan telah bertentangan dengan hukum-hukum yang mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul di Indonesia. Berbagai kelompok mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi damai telah dijamin oleh peraturan perundangan seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Negara, melalui aparat keamanan, semestinya menghargai dan menghormati kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Namun, berbagai kasus pengekan demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok yang menyuarakan situasi dan persoalan Papua adalah tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain bagian upaya menutup-nutupi persoalan Papua, pembatasan dan pengekan terhadap masyarakat Papua telah merendahkan harkat dan martabat hukum negara Indonesia yang telah menjamin warganya untuk

30 Lihat <http://tabloidjubi.com/artikel-8766-peringati-55-tahun-new-york-agreement-100-orang-ditangkap-di-tiga-kota.html>, diakses pada 3 Oktober 2018

31 *Ibid.*

32 Lihat <https://suarapapua.com/2017/12/19/tolak-trikora-amp-dan-fri-wp-aksi-di-14-kota-66-orang-ditangkap/>, diakses pada 5 Januari 2018

berekspresi dan berpendapat di muka umum. Perampasan kebebasan terhadap orang-orang Papua menjadi tanda kegagalan Negara dalam memberlakukan Papua sebagai daerah yang sama, tanpa diskriminasi, dengan wilayah lain di Indonesia.

REKOMENDASI

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM

1. Melaksanakan ratifikasi hukum yang menjamin warganya berpendapat sesuai hukum internasional; DUHAM dan Kebebasan berekspresi dan berpendapat
2. Melaksanakan Pasal 28 UUD 1945
3. Melaksanakan perintah Kepala Negara, presiden Joko Widodo yang mendukung kebebasan berpendapat; akses informasi internasional.
4. Membuka ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga negara yang menyampaikan aspirasi terkait masalah Papua baik di Tanah Papua maupun di berbagai daerah di Indonesia; baik masalah kemanusiaan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri.

Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri, Kapolda, Kapolres)

1. Melaksanakan hukum nasional dan internasional yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.
2. Pihak kepolisian bertugas untuk menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan aksi dan siap mengawal ketika ada kelompok atau organisasi masyarakat sipil melakukan aksi demonstrasi terkait masalah-masalah Papua; kemanusiaan, HAM, dan penentuan nasib sendiri.
3. Mengubah cara-cara represif dalam menghadapi aksi demonstrasi damai terkait masalah-masalah Papua; kemanusiaan, HAM, dan penentuan nasib sendiri. Dalam menangani pembubaran aksi, pihak kepolisian atau aparat keamanan harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.
4. Bekerja secara profesional, tanpa deskriminasi dan stigmatisasi terhadap aksi-aksi demonstrasi damai masyarakat Papua.
5. Mengutamakan negosiasi dan dialog terbuka saat menghadapi masyarakat Papua yang menggelar aksi damai.

Masyarakat Sipil dan Media Massa

1. Menyuarakan lebih kritis dan keras tindakan represif aparat keamanan.
2. Mengkampanyekan lebih luas kepada aparat keamanan tentang hukum-hukum yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.

3. Selalu memantau dan mengawasi aparat keamanan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku saat menghadapi aksi demonstrasi damai.
4. Media memberitakan aksi demonstrasi damai dengan profesional dan memberikan konteks yang tepat terkait hukum-hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi terkait masalah-masalah Papua.
5. Media memberitakan aksi demonstrasi damai sesuai prinsip-prinsip jurnalisme, tanpa memberikan stigma, diskriminasi, dan cara pandang yang bias terkait aksi-aksi masyarakat Papua.

Bab 4

Tambang Freeport: Konflik Bersenjata dan Distorsi Informasi



Area penambangan Freeport di Mimika, Papua menjadi arena konflik sejak perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu beroperasi. Dari konflik yang ada, konflik bersenjata tercatat sering terjadi di area tambang Freeport.

Konflik itu telah menyebabkan jatuhnya korban, baik terluka maupun meninggal dunia, dari kalangan bersenjata atau masyarakat, pekerja maupun warga. Konflik bersenjata yang berlangsung dalam periode cukup panjang terjadi antara TPN-OPM dan TNI-Polri, seperti yang terjadi pada tahun 2017.

Selain persoalan konflik bersenjata, liputan media dan publik turut memantau situasi tersebut. Namun, peran media sebagai penyambung suara publik tak mampu bekerja lebih profesional dan independen karena menghadapi masalah pembatasan dan akses ke area Freeport.

Informasi terkait konflik pun tampak bias dan kusut. Informasi terkait pihak yang berdampak terhadap konflik tersebut, yaitu masyarakat tidak terungkap secara jelas. Kekusutan informasi kian melebar dengan disajikannya informasi yang masih bias dan tidak berimbang.

SEKITAR tiga bulan terakhir pada 2017, area tambang Freeport kembali menjadi perhatian media, dari lokal, nasional, hingga internasional. ‘Kisah penyanderaan’ di Kampung Kimbeli dan Banti, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dimulai pada Sabtu, 21 Oktober 2017 di kampung Utikini, Mimika, dua anggota Brimob Batalyon B Timika terkena tembakan.³³ Sehari kemudian, Minggu, 22 Oktober 2017, peristiwa penembakan kembali terjadi di Jembatan Utikini. Briptu Putra, anggota Brimob, terkena tembakan.

Kisah penembakan ini terus berlanjut dan berdampak luas. Negara mengirim pasukan keamanan dari tentara dan polisi untuk bertempur dengan kelompok yang melakukan penembakan tersebut, yang oleh pimpinan Polri dan TNI disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dalam sebuah telewicara Metro TV dengan Kapolda Papua Irijend Pol. Boy Rafli Amar terungkap penjelasan tentang siapa pelaku penyerangan dan penembakan tersebut. “Mereka adalah kelompok kriminal, termasuk menjarah dan merampas alat komunikasi dari warga masyarakat, termasuk uang, bahkan ada juga yang melaporkan terjadinya tindakan pidana pemerkosaan. Kalau kita lihat mereka ini adalah memang generasi-generasi muda dari kelompok kriminal bersenjata yang antara lain mereka juga ada dari keturunan yang dulu juga pernah menjadi buronan dari kepolisian seperti Kelly Kwalik, anaknya juga ada di dalam kelompok ini. Kemudian juga dari Arjun Waker, dimana adiknya Saptinus Waker dan beberapa generasi muda berikutnya berada di dalam kelompok ini yang saat ini melakukan isolasi terhadap warga tersebut. Kita masih mendalami motif mereka.”³⁴

Namun bagi mereka yang melakukan penembakan, secara jelas dan terang membantah tudingan tersebut. Mereka membantah bila disebut Kelompok Kriminal Bersenjata, melainkan menyatakan diri sebagai Tentara Perjuangan Kemerdekaan OPM. Hal ini terdengar jelas pada unggahan video berdurasi 16.09 menit di sebuah akun You Tube.³⁵ Mereka tidak menyembunyikan identitasnya, di kepala surat yang ditulis dengan tulisan tangan terbaca dan terlihat secara jelas bahwa mereka dari Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III Timika TPN OPM Papua Barat. Alasan mereka melakukan penembakan juga secara jelas disampaikan di dalam tulisan surat tersebut.

33 Lihat <http://metromerauke.com/2017/10/23/kronologi-penembakan-7-anggota-brimob-di-mimika-dalam-3-hari/>, diakses pada 28 November 2017

34 Suara dari Kapolda Papua Irijend Pol. Boy Rafli Amar dalam telewicara dengan Media Metro TV pada 9 November 2017, Bdk. <http://m.metrotvnews.com/play/2017/11/09/785669>

35 Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=749uca-pMZ4> atau di dalam lima lembar surat tulisan tangan dari TPN OPM wilayah Mimika, bdk. <http://www.tabloid-wani.com/2017/10/statement-oleh-TPN-OPM-makodam-ii-timika-west-papua.html>, diakses pada 28 November 2017

“...Kami Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) melakukan penyerangan di areal Freeport Mc. Moran/PT. Freeport Indonesia berdasarkan surat perintah operasi (PO), yang dikeluarkan di Mabes oleh Jendral Jack Millian Kemong, bunyi perintah operasi adalah; Mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa di dunia oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebab tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mukadimah UUD 1945 adalah dasar hukum dan peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia itu sendiri. Pemerintah Indonesia harus sadar bahwa penjajahan atas bangsa Papua ras Melanesia berarti UUD pemerintah Republik Indonesia tahun 1945 tidak diberlakukan dan tidak dihormati oleh pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Berdasarkan surat perintah operasi tersebut kami sudah melakukan dan akan melakukan aksi-aksi penyerangan di areal Freeport.....”³⁶

Dalam pertempuran itu Polri mengirimkan kekuatannya ke Mimika, yaitu 100 personil Brimob dari Polda Nusa Tenggara Barat, 100 personil dari Polda Kalimantan Tengah dan 100 personil dari Kelapa Dua Jakarta. Pasukan itu diterbangkan ke daerah Mimika untuk berperang dengan TPN OPM Makodam III Mimika. Satu sisi terkesan menakutkan, di sisi lain terkesan berlebihan karena pengerahan pasukan dari Polri jumlahnya sekitar 300 personil Brimob untuk melawan pasukan TPN OPM yang jumlahnya sekitar 20 personil. Kekuatan personil Brimob juga dibantu oleh kekuatan dari TNI. Selain itu Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengeluarkan Maklumat pada 12 November 2017 untuk TPN OPM³⁷

Salah satu hal yang cukup menarik dari ‘peperangan’ pada Oktober 2017 di Areal PT Freeport adalah peran serta media yang mempublikasikan situasi di sekitar Kampung Banti, Kimbely dan Utikini. Informasi yang dikonsumsi oleh publik pun berbeda-beda berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat dan baca. Publik mencerna apa yang disajikan oleh media baik cetak, internet dan dalam bentuk audio visual. Dengan demikian publik pun memahami apa yang diketahuinya. Pertanyaannya bagi media adalah sejauh mana independensi sebuah media di dalam mengolah dan mewartakan informasi.

Berita seperti dugaan kriminal perkosaan, penyanderaan sekitar 1300 warga yang disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Boy menjadi perdebatan dan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Isi Maklumat Kapolda Papua: diperintahkan kepada seluruh masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara ilegal agar secepatnya: 1. Meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia). 2. Agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.

sebuah diskusi yang cukup kuat pada beberapa media. Pernyataan Kapolda Papua ditanggapi oleh TPN OPM. Di media tempo.co, mengeluarkan judul berita “Polisi Dinilai Manipulasi Kabar Penyanderaan Warga Papua”³⁸ yang tentunya membantah pernyataan Kapolda Papua Boy Rafli. Di media ini, Pengacara HAM Veronica Koman membantah berita penyanderaan dan intimidasi terhadap 1300 warga di Desa Kimberli dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Hal yang mengejutkan lagi adalah pengakuan dari seorang warga yang mendiami Desa Banti yang merupakan pemimpin Suku Amungme Jonathan Kibak. Ia menuturkan bahwa orang-orang di sana (Kampung Banti) aman, tidak disandera. Warga dibiarkan bebas. Menurut Kibak, pihak TPN OPM tidak menjamin keselamatan warga di sana jika warga melewati zona pertempuran dan terjebak di dalam baku tembak. “Saya ingin menegaskan, bahwa kami tidak disandera. Tidak ada orang di kampung yang berhenti melakukan aktivitas sehari-hari”.³⁹

Di tempat terpisah Komandan TPN OPM Hendrik Wanmang menjelaskan bahwa warga di Kampung Kimbeli dan Banti tidak dijadikan sasaran tetapi terjebak karena berada di dalam zona konflik. “Saya masih mempertimbangkan bagaimana mengeluarkan mereka dari sini. Jika saya mengeluarkan mereka, saya harus mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh TNI dan polisi terhadap orang asli Papua. Saya tidak ingin ada nyawa yang hilang, saya tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban.”

Di media tirto.id diberitakan pihak TPN OPM membantah tuduhan dari pihak aparat keamanan bahwa ada pemerkosaan yang dilakukan di Tembagapura oleh TPN OPM. Menurut Hendrik Wanmang, informasi pemerkosaan tersebut digunakan oleh pihak aparat keamanan untuk mengerahkan personel bersenjata ke kampung-kampung di Distrik Tembagapura.⁴⁰

Pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai peristiwa yang terjadi di Papua bukanlah penyanderaan tetapi merupakan sebuah perlawanan yang menentang kekuasaan pemerintah Indonesia. Menurut peneliti LIPI Cahyo Pamungkas, masalah utama di sana adalah ketidakadilan yang sudah terjadi sekian lama.⁴¹

38 Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1033025/polisi-dinilai-manipulasi-kabar-penyanderaan-warga-papua>, diakses pada 28 November 2017

39 Lihat <http://tabloidjubi.com/artikel-11432-warga-banti--kami-tidak-disandera.html>, diakses pada 28 November 2017

40 Lihat <https://tirto.id/tpn-opm-di-timika-tidak-benar-ada-perkosaan-dan-penyanderaan-czYp>, diakses pada 28 November 2017

41 Lihat <http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb72JBaN-peneliti-lipi-sebut-konflik-papua-terkait-gerakan-papua-merdeka>, diakses pada 28 November 2017

Konflik bersenjata antara TPN OPM dan TNI Polri telah memberikan dampak psikologis dan trauma terhadap warga di Kampung Banti dan Kimbely dan sekitarnya. Pelayanan dasar terhadap masyarakat menjadi terganggu. Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Viktor Mackbon menyatakan peristiwa itu menyebabkan masyarakat Banti dan sekitarnya sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. “Petugas Medis dan guru yang bertugas di Banti sudah diungsikan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.”⁴²

Dalam situasi demikian, muncul perdebatan terkait cara militer melaksanakan operasi bersenjata. Panglima Daerah Militer XVII/Cenderewasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menjelaskan bahwa pengejaran dan upaya menghentikan TPN OPM di Mimika sebaiknya aparat keamanan mengesampingkan dulu HAM. Pendapat ini ditanggapi anggota DPR Papua Laurens Kadepa. Laurens justru mencemaskan sikap aparat keamanan dalam menyelesaikan persoalan di Tembagapura itu. Ia menilai masyarakat dapat menjadi korban. “Ini yang saya khawatirkan. Saya setuju penegakan hukum, tapi saya tidak sependapat kalau mengesampingkan HAM.”⁴³

Kemelut konflik di kawasan tambang Freeport di Tembagapura, Mimika, Papua ini juga terjadi pada wacana dan informasi publik yang tersebar di media. Media menyiarkan informasi dengan sumber tak berimbang, misalnya, hanya bersumberkan dari aparat keamanan, yang memuat ‘kepentingan’ operasi militer di lapangan. Sehingga, informasi yang disampaikan masih dipertanyakan akurasi di lapangan.

Pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman menyatakan informasi yang sepihak itu mengaburkan informasi sebenarnya di lapangan. Menurutnya distorsi pemberitaan sepihak ini disebabkan buruknya kebebasan pers di Papua, termasuk masih ditutupnya akses jurnalis asing ke Papua.⁴⁴

Peran media dalam memberitakan peristiwa konflik di area Tembagapura itu terus disoroti berbagai pihak. Media menggunakan istilah atau diksi kata dari aparat keamanan yang telah memicu kontroversi di kalangan publik, misalnya, penggunaan istilah penyanderaan. Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi), pada 15 November 2017 mengeluarkan siaran persnya di Jakarta, yang diantaranya mengutip mengutip pernyataan Pejabat Humas Polda Papua AKB Suryadi Diaz yang disampaikannya ke BBC, 12 November 2017 bahwa para anggota TPN OPM tidak menyandera penduduk, melainkan bersiaga di sejumlah titik yang menjadi pintu

42 Lihat <https://www.antaraneews.com/berita/662727/setelah-penembakan-mimika-masyarakat-sulit-dapatkan-layanan-publik>, diakses pada 28 November 2017

43 Lihat <http://tabloidjubi.com/artikel-11344-tni-dinilai-abaikan-ham-legislator-tak-ingin-warga-sipil-korban>, diakses pada 28 November 2017

44 *Op.Cit.*, <https://tirto.id/tpn-opm-di-timika-tidak-benar-ada-perkosaan-dan-penyanderaan-czYp>, diakses pada 28 November 2017

utama Kampung Banti dan Kimbely. Lebih lanjut Gema Demokrasi menjelaskan bahwa frasa penyanderaan yang digunakan oleh beberapa media sangat berlebihan dan dapat menimbulkan konflik-konflik yang baru.⁴⁵

Untuk menghentikan informasi yang bermuatan kepentingan tertentu, Gema Demokrasi mendesak: Pertama, seluruh media massa untuk tidak menggunakan frasa penyanderaan dan harus menyajikan fakta aktual, akurat dan berimbang. Kedua, aparat keamanan mengedepankan upaya persuasif agar tidak ada korban yang berjatuh dan berhenti menyebarkan informasi yang tidak sesuai faktanya. Ketiga, Dewan Pers mengusut terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh sejumlah media yang memberitakan kondisi Papua belakangan ini.⁴⁶

Di Tanah Papua, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari berbagai NGO/LSM, kelompok gerakan mahasiswa dan masyarakat, melakukan konferensi pers di Kantor ALDP, Selasa 21 November 2017. Dengan berbagai data dan informasi, koalisi mengancam tindakan sepihak dan tidak berimbang dari media yang mempublikasikan kejadian di Kampung Banti dan Kimbely. Koalisi melihat bahwa penyanderaan seperti yang disampaikan oleh beberapa media tidaklah benar karena tidak ada tuntutan yang disampaikan oleh para penyandera. Selain itu beberapa pengakuan masyarakat di Kampung Banti dan Kimbely mengungkapkan bahwa mereka tidak berada di dalam situasi penyanderaan.

Terkait penyanderaan, Kapolres Mimika telah membantah bahwa situasi di Kampung Banti dan Kimbely bukan situasi penyanderaan. Dengan situasi tersebut, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua mendesak: Pertama, agar Alat Negara tidak menyebarkan informasi yang tidak benar tanpa ada fakta dan bukti. Kedua, media atau pers agar melakukan kerja-kerja jurnalis yang berprinsip pada kemerdekaan pers secara bertanggung jawab terutama melakukan verifikasi setiap informasi yang diterima. Ketiga, mendesak PT Freeport agar segera menyampaikan apa yang sebenarnya yang terjadi di Kampung Banti dan Kimbely.⁴⁷

Peristiwa konflik bersenjata di kawasan Freeport pada November 2017 telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat sipil, yang berulang kali menjadi korban. Dan, media turut berperan penting dalam situasi konflik seperti ini. Kebenaran faktual adalah roh media yang terus dijaga, sehingga tak turut menyulut kemelut konflik lebih besar.

45 Lihat Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Gema Demokrasi di Jakarta pada 15 November 2017

46 *Ibid.*

47 Lihat konferensi pers ini dalam tautan berikut: di <https://www.youtube.com/watch?v=JEUwS5yym8>

REKOMENDASI

Kepolisian Republik Indonesia: Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Tentara Nasional Indonesia

1. Melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan proporsional.
2. Melakukan operasi bersenjata dengan tetap menjaga nilai-nilai hak asasi manusia.
3. Memberikan kebebasan akses yang luas kepada seluruh awak media untuk melakukan kegiatan jurnalistik di lapangan.
4. Memberlakukan media sebagai pihak yang independen

Kementerian Pertahanan, Kementerian Politik Hukum dan HAM

1. Menyampaikan secara jelas dan tepat apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Kimbeli dan Banti, Kabupaten Mimika
2. Menegur pihak keamanan agar tidak melakukan penyisiran yang berlebihan dan mengorbankan masyarakat sipil.
3. Mendorong penyelesaian konflik melalui jalur perundingan dan pendekatan kemanusiaan
4. Menggali lebih dalam dan menemukan penyebab-penyebab konflik dan segera menyelesaikannya, tanpa melalui kekerasan dan operasi keamanan.

Media: Jurnalis dan Ruang Redaksi

1. Menjaga independensi dalam melaporkan peristiwa konflik bersenjata di Papua.
2. Menjaga informasi berimbang dengan menghadirkan sumber-sumber yang layak dipercaya akurasi dan kebenarannya.
3. Mencari sumber-sumber lain di lapangan di luar sumber resmi dari aparat keamanan.
4. Melakukan verifikasi terkait informasi-informasi yang beredar dan disampaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
5. Mengirimkan reporter atau jurnalis turun ke lapangan melakukan reportase langsung.

Bab 5

Represi Aparat Keamanan: Penyiksaan, Penembakan, Sweeping



WAJAH buruk keamanan negara di Tanah Papua tak juga sirna. Penembakan dan penyiksaan aparat keamanan terhadap orang Papua menguatkan cara-cara represif sulit diubah dalam menyelesaikan persoalan Papua.

Kekerasan yang dipraktikkan aparat keamanan kepada warga Papua terekam dalam dokumentasi Memoria Passionis pada 2017. Keamanan negara: Polri dan TNI menggunakan cara represif dan kekuatan senjata beberapa peristiwa di sejumlah daerah pedalaman dan kota kabupaten di Tanah Papua.

Tindakan represif keamanan negara pada 2017 menyebar ke sejumlah wilayah: Kota Kabupaten Dogiyai; Kampung Oneibo di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai; Kampung Beraf, Kabupaten Jayapura; Distrik Mugi, Kabupaten Nduga; Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya; Kepulauan Yapen.

- | | | | |
|----|----|-----------------|---------------------------------|
| 05 | 1. | Johannes Palaga | patuk fulang palas |
| 13 | 2. | Esebius Palaga | Telapak kaki |
| 23 | 3. | Delian Pelen | betis, palas, Rusuk, Rahu |
| 25 | 4. | Julian Pigan | Kedua palas patah dan kemaluan. |
| 12 | 5. | Peniss Palaga | tangan kanan. |
| 5 | 6. | Amos Palaga | kaki kiri Tumbuk peluru. |
| 67 | | Marius Dogopin | paucet sebelah kiri |
| 8. | | Demia Pelen | |
| 9. | | Melias Palaga | |



Bukti selongsong peluru pada kasus penembakan warga di Oneibo pada 1 Agustus 2017 oleh anggota Brimob.
Foto: Abeth You/Jubi



Penembakan di Oneibo Dan Insiden Lain

Kasus penembakan pada 1 Agustus 2017 di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai adalah kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat luas, baik di Papua maupun di Jakarta. Sejumlah anggota kepolisian dari Brigade Mobile (Brimob) BKO Polda Papua melakukan penembakan kepada sekelompok masyarakat, ada sebelas orang dilaporkan mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit setempat. Lalu, seorang warga bernama Yulianus Pigai, 27 tahun, meninggal dunia⁴⁸

Insiden penembakan ini bermula pada peristiwa seorang warga tenggelam saat mandi di sungai yang berhasil diangkat. Lalu, mereka meminta bantuan ke para pekerja proyek jembatan dari PT Putra Dewa Paniai, menggunakan kendaraan tersebut untuk membawanya ke rumah sakit terdekat tetapi ditolak. Warga pun membawa korban ke rumah sakit tanpa kendaraan mobil namun korban meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Meninggalnya korban itu kemudian memicu kemarahan warga kepada para pekerja atau karyawan PT Putra Dewa Paniai. Lalu pihak pekerja melaporkan warga ke aparat keamanan setempat. Maka, sejumlah anggota dari Brimob BKO Polda Papua datang dan melakukan penembakan ke arah warga.

Aksi penembakan aparat keamanan ini kemudian dikecam banyak pihak: Gereja, Pemerintah, Legislatif, dan para pegiat kemanusiaan, dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban Deiyai. Bahkan, Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr bersuara, mengutuk semua bentuk tindak kekerasan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat keamanan, karena telah menghilangkan nyawa warga sipil.⁴⁹

Penembakan di Kampung Oneibo itu membangkitkan solidaritas masyarakat di Papua maupun luar Papua. Mereka mendesak agar pelakunya dihukum seberat-beratnya karena tindakan itu telah menyebabkan kematian dan penderitaan masyarakat. Karena desakan publik yang kuat, para anggota Brimob tersebut diproses hukum melalui sidang kode etik kemiliteran di Polda Papua. Namun, hukuman yang dijatuhkan belum memenuhi asas keadilan publik: hukuman ringan, yaitu permintaan maaf dan mutasi.

⁴⁸ Lihat Laporan SKPKC Kingmi, SKP Keuskupan Timika dan SKPKC Fransiskan Papua. Laporan ini bisa diakses melalui link berikut, <http://fransiskanpapua.org/2017/11/14/laporan-penembakan-di-kampung-oneibo-kabupaten-deyai-papua/>

⁴⁹ Lihat Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr: Surat Pernyataan Sikap Gereja Katolik Keuskupan Timika terkait penembakan di Kampung Oneibo, Deiyai. Lihat juga: <http://fransiskanpapua.org/2017/08/05/pernyataan-uskup-timika-mgr-jhon-philip-saklil-pr-penembakan-di-deiyai/>

Tabel korban penembakan di Kampung Oneibo
Berdasarkan laporan KPKC Kingmi dan SKP Keuskupan Timika

No	Nama Korban	Umur	Keterangan Kekerasan	Status Terakhir
1	Yulianus Pigai	27 thn	Luka tembak kedua paha dan bagian bawa perut	Meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Waghete
2	Delian Pekei	20 thn	Luka tembak di pipi Kanan, lengan, paha bagian kiri. Dokter menemukan 8 butir peluru di tubuhnya.	Dievakuasi ke RSUD Nabire, dilanjutkan ke RSUD Dok II Jayapura
3	Yohanes Pakage	29 thn	Luka tembak betis bagian kanan, tulang kaki bagian depan kak hancur	
4	Albertus Mote	Siswa SD, 11 thn	Luka tembak di pinggang	Dirawat di RSUD Waghete
5	Esebius Pakage	14 thn	Luka tembak tangan kanan dan kiri	
6	Yunior Pakage	Siswa SMP, 15 thn	Luka tembak telapak kaki kiri tembus dari kanan ke kiri.	Dirawat di Wahgete, lanjut di RSUD Nabire
7	Amos Pakage	27 thn	Luka tembak kaki kanan	Berobat sendiri
8	Marius Dogopia	21 thn	Luka tembak bagian pantat	Dirawat di RSUD Uwibutu, lanjut di RSUD Nabire
9	Penias Pakage	Siswa SMP, 14 thn	Luka tembak bagian betis	
10	Titus Pekei	30 thn		
11	Meky Pakage	Siswa SMP, 14 thn	Luka tembak di tangan kanan	Dirawat di RSUD Waghete
12	Martinus Pekey	51 thn	Tidak terkena tembakan. Sedang sakit tetapi mendengar bunyi tembakan, kaget dan meninggal di tempat	

Pada 17 Januari 2017 aparat keamanan dari Polres Jayapura menembak David Tarkouw di Kampung Beraf. Menurut pengakuan David Tarkouw, ia sudah menyerah tetapi aparat kepolisian tetap menyeret dan menembaknya.⁵⁰ Dari kesaksian David, ia diberlakukan oleh aparat keamanan tanpa alasan yang jelas, apalagi terkait dengan pelanggaran hukum. Dalam kesaksiannya di LBH Papua, David menuturkan aktivitasnya sehari-hari sebagai petani.

”Selama ini saya menjalankan aktivitas saya seperti biasa. Saya ke kebun, saya turun ke Kota Jayapura. Saya tidak merasa bahwa mereka (aparat kepolisian)

⁵⁰ Lihat Laporan LBH Papua yang tidak dipublikasikan

mencurigai saya. Dan saya juga merasa bahwa saya tidak bersalah. Saya sendiri bingung.”⁵¹

David mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berlanjut saat menjalani perawatan medis. Menurutnya pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit Bayangkara Jayapura tidak maksimal. Ia dibiarkan terlantar. Selain itu pihak kepolisian juga tidak memberikan akses yang mudah bagi pengacara yang akan membantu dan memberikan pendampingan hukum.

Menurut Simon Pattiradjawane, pengacara dari LBH Papua yang mendampingi David, mengalami kesulitan untuk menemuinya. “Kami sebagai pengacara atau pendamping hukumnya dipersulit untuk bertemu dengan Bapak David Tarkouw. Setiap kali kami berkunjung dan bertemu, selalu saja ada anggota polisi yang terus bersama dan mengawasi kami.”⁵²

Peristiwa penembakan lain dilaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Michael Merani, seorang tokoh aktivis Papua Merdeka ditembak dan disiksa saat perjalanan menuju Mapolres Yapen. Michael tewas di tempat. Jenasahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui.⁵³

Pada 27 Maret 2017 Michael Merani ditembak di Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Tiga tahun lalu ia ditetapkan sebagai DPO karena terlibat tindak kekerasan tetapi kasusnya tidak terbukti. Selama menyangang status DPO ia tinggal di Angkaisera. Menurut Pendeta Dora Balubun, Koordinator KPKC GKI Tanah Papua mempertanyakan mengapa Michael tidak ditangkap tetapi aparat keamanan menembaknya, padahal korban tidak bersembunyi dan tinggal di Angkaisera.⁵⁴

Tindakan kekerasan selain dengan penembakan, juga melalui senjata tajam. Aparat keamanan, yang diduga dari Timsus 753, menikam dua warga sipil bernama Yus Degei, 32 tahun dan Piet Degei, 27 tahun di Kampung Uwibutu, Paniai, pada 1 Mei 2017. Peristiwa itu berawal dari kedua korban yang akan membeli sabun atau deterjen di sebuah kios, tetapi keduanya dituduh mencuri sabun rinso oleh pemilik kios dan melaporkannya ke anggota kepolisian. Anggota aparat keamanan tersebut kemudian menikam Yus dan Piet tanpa bertanya lebih dulu. Kedua korban kemudian menjalani perawatan di RSUD Madi.⁵⁵

51 Hasil wawancara dengan Simon Patiradjawane, pendamping hukum Bapak David Tarkouw, di Kantor LBH Papua

52 *Ibid.*

53 Lihat Laporan SKP Keuskupan Timika tentang Penyiksaan Warga Sipil di Kepulauan Yapen, 2017 yang tidak dipublikasikan

54 Lihat <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/papua-maikel-merani-03272017165342.htm>, diakses 15 Januari 2018.

55 Lihat <http://suarapapua.com/2017/05/04/penikaman-dua-warga-di-paniai-dap-tarik-pasukan-tak-jelas>, diakses pada 24 Januari 2018

Kasus penembakan berikutnya dilakukan oleh seorang anggota TNI di Pelabuhan Paomako, Kabupaten Timika pada 9 Agustus 2017. Tiga orang nelayan menjadi korban, seorang nelayan bernama Theo Camtar tewas di tempat.⁵⁶

Di Kabupaten Nduga, tepatnya di Distrik Mugi, pada 15 Desember 2017, aparat keamanan melakukan penyisiran dan penembakan terhadap warga sipil.⁵⁷ Berdasarkan laporan dari Koalisi Untuk Keadilan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah, penyisiran ini dilakukan karena terjadi penyerangan dan penembakan terhadap aparat keamanan pada 12 Desember 2017.

Penyerangan tersebut menyebabkan seorang operator alat berat Yovicko Sondak tertembak dan meninggal, seorang anggota TNI Prada Didimus Abindodifu mengalami luka-luka. Walaupun demikian penyisiran oleh aparat TNI ini dinilai terlalu berlebihan karena mengorbankan masyarakat, yaitu lima warga sipil tertembak, empat dianiaya dan dua rumah warga dibakar.

Pada akhir tahun 2017, tepatnya pada Perayaan Natal 25 Desember 2017, seorang pelajar Nikolaus Bernolpus (19) ditembak hingga meninggal dunia oleh aparat kepolisian Polres Mappi Bripka DE.⁵⁸ Menurut Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke Pater Anselmus Amo, MSC, Bripka DE itu harus dihukum seberat-beratnya karena sudah bermain hakim sendiri. Walaupun demikian, peristiwa ini masih menjadi pertanyaan dan harus didalami terkait apakah benar warga yang melakukan penyerangan yang berakibat pada penembakan tersebut. Sedangkan menurut Kapolres Mappi AKBP Wartono, penembakan itu terjadi karena ada perkelahian. Aparat kepolisian tidak menerima teguran dari korban sehingga pelaku melakukan penembakan.

Operasi Mantap Praja Di Dogiyai Dan Insiden Lain

Pada September 2016 Kepolisian Republik Indonesia menggelar Operasi Mantap Praja untuk mengamankan dan memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017 dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian operasi ini dilaksanakan hingga pelantikan kepala daerah terpilih, dan melakukan pengamanan khusus bagi daerah-daerah rawan.⁵⁹ Papua dan

⁵⁶ Laporan SKP Keuskupan Timika, 2017. Lihat juga: <http://fransiskanpapua.org/2017/08/15/laporan-penembakan-3-warga-sipil-di-paomako-mimika/>

⁵⁷ Lihat laporan Koalisi untuk Keadilan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah, <http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2017/12/Pers-Rilis-penyisiran-nduga.pdf>

⁵⁸ Lihat <http://tabloidjubi.com/m/artikel-12669-keuskupan-agung-merauke-pelaku-penembakan-remaja-di-mappi-harus-diperiksa-kejiwaannya.html> dan <http://www.liputan24.com/2017/12/keuskupan-agung-merauke-pelaku.html>, diakses pada 24 Januari 2018

⁵⁹ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/19/18534661/agar.pilkada.serentak.lancar.polri.gelar.operasi.mantap.praja>

Papua Barat, masuk dalam daerah rawan konflik dalam Pilkada serentak 2017.

Di Dogiyai, pelaksanaan Operasi Mantap Praja telah mengakibatkan eksekusi negatif yang justru melahirkan kekerasan dan konflik baru di masyarakat dengan aparat keamanan. Tim Gabungan dari Kepolisian Daerah Papua melakukan kegiatan yang kontraproduktif. Anggota tim kepolisian melakukan sweeping: alat-alat tajam, rambut gimplal, uang masyarakat, atribut-atribut atau asesoris motif gerakan pro-kemerdekaan. Aparat keamanan melakukan sweeping disertai dengan tindakan kekerasan dan penyiksaan.⁶⁰

Penyiksaan ini juga terjadi di Kabupaten Dogiyai. Emosi anggota Polsek Moanemani karena aksi tolak sweeping mengorbankan Nolaskus Douw (Sekretaris Kampung Yotapuga) dan mahasiswa Ferdinand Tebay (19 tahun). Anggota Polsek Moanemani memukul Ferdinand dan Nolaskus Douw dengan balok di halaman Polsek Moanemani.⁶¹

Sehari sebelumnya, pada 10 Januari 2017, seorang pemuda Otis Pekey yang hendak ke Nabire disweeping di Dogiyai. Dalam sweeping tersebut, di dalam tas korban ditemukan sebilah pisau. Menurut Otis, pisau disimpan untuk menjaga dirinya karena berkendaraan motor dari kampungnya ke Nabire sangat jauh dan berisiko. Alasan Otis tidak diterima oleh tim gabungan aparat pada saat itu. Otis ditahan, dipukul sampai babak belur dan dibawa ke Mapolsek Moanemani. Pada pukul 15.00 waktu setempat, Otis dibawa pulang ke rumahnya, setiba di rumahnya pada pukul 16.00 waktu setempat, Otis menghembuskan nafasnya terakhir.⁶² Aksi ini dikecam oleh pihak Gereja dan masyarakat Dogiyai karena tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terkait pengamanan Pilkada.⁶³

Berdasarkan laporan dari Solidaritas Peduli HAM Dogiyai, sweeping yang dilakukan adalah alat tajam, atribut Papua Merdeka, aktivis HAM, rambut gimplal, uang dan orang mabuk.

60 Laporan Ekstra Sweeping di Dogiyai "Tim Gabungan Giat Operasi Mantap Praja Di Dogiyai Melakukan Ekstra Sweeping Di Dogiyai oleh Solidaritas Peduli HAM Kabupaten Dogiyai, dipublikasikan pada 23 Januari 2017. Lihat, <http://kabarmapegaa.blogspot.com/2017/01/laporan-ekstra-sweeping-di-dogiyai.html>, diakses 26 November 2017.

61 Lihat Laporan Solidaritas Peduli HAM Deiyai (SPHAM) dan SKP Keuskupan Timika yang tidak dipublikasikan.

62 *Ibid.*

63 Sweeping ini dilakukan dari September 2016 dan diteruskan pada Januari 2017. Lihat <http://suarapapua.com/2017/01/25/sweeping-tanpa-arrah-jelang-pilkada-dogiyai/>, <https://www.tabloidjubi.com/artikel-2965-sweeping-aparat-gabungan-mulai-meresahkan-masyarakat-dogiyai-akan-datangi-dprd.html>

**Berikut adalah Tabel Korban Kekeraan Fisik oleh Tim Gabungan
Giat Operasi Mantap Praja (GOMPRA) di Kabupaten Dogiyai.⁶⁴**

No	Nama Korban	Umur	Status Jabatan
1	Paskalis Edowai	46 thn	Kepala Puskesmas Denemani
2	Melianus Boga		Staf PNS BPMK Dogiyai
3	Jhon Pigome		Pemuda
4	Yohanes Degei	25 thn	Staf Honoror Bagian Umum Pemda Dogiyai
5	Anton Dogomo	24 thn	Pemuda
6	Marten Goo	20 thn	Mahasiswa UNIPA
7	Melkias Dogomo	33 thn	Pemuda
8	Esau Iyai	35 thn	Mantan Anggota DPPRD Dogiyai
9	Otis Pekei		Pemuda
10	Bendiktus Magai	24 thn	Pemuda
11	Nolaskus Douw	34 thn	Sekretaris Kampung Yotapuga
12	Ferdinan Tebai	19 thn	Mahasiswa UNIPA II di Sorong
13	Desederius Goo	24 thn	Mahasiswa UPRI Makassar
14	Diakon Aleks Pigai	30 thn	Tim Pastoral Paroki Sta. Maria Ratu Rosari Idakebo
15	Oktovianus Goo	24 thn	Staf Perawat Puskesmas Moanemani
16	Oktopianus Bobii	19 thn	Mahasiswa UNIPA
17	Natalis Goo	22 thn	Mahasiswa UNCEN

⁶⁴ *Op.Cit.* Laporan oleh Solidaritas Peduli HAM Deiyai (SPHAM) dan SKP Keuskupan Timika yang tidak dipublikasikan.

Keterangan Kekerasan	Status Terakhir
Uang Rp 200.000 diambil	
Dahi, Pipi dan Telinga Pecah	Kritis tetapi sudah sembuh
Silet Cukur diambil	
Tangan Kanan tidak bisa bergerak	Ringan
Kepala dan Muka Bocor	Kritis tetapi sudah berobat di Moanemani
Kepalanya luka luka	Ringan
Disuruh Jilat Ujung Senjata	Meninggal
Pisau Dapur diambil	
Dipukul Babak belur	Meninggal
Dahi, Pipi dan Kepala Bocor	Kritis dan berobat di Nabire
Bibir Atas Pecah	Ringan
Dahi, Pipi dan Kepala dan Pelipis Mata Luka Luka	Kritis tetapi sedang membaik
Kepala Bocor, Dada bengkak Besar, Pipir Luka Berak, Pelipis Mata bengkak Besar Besar dan Pungkuk Beng- kak Bercak Darah Hitam	Kritis berat
Leher Belakang dan Dahi luka luka	Ringan
Dagu Tertusuk Balok dan Tangan Luka Luka berat dan Muka bengkak bercak Darah	Kritis
Dada Bengkak besar dan Kaki Tertumbuk Balok hingga Luka besar	Kritis
Muka tergores	Ringan

Penyiksaan adalah tindakan aparat keamanan yang masih sering dilakukan dan tercatat dalam peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua. Tak sedikit tindakan penyiksaan itu berujung pada kematian pada korban.

Sebanyak enam anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya menganiaya seorang pemuda bernama Edison Hesegem hingga tewas pada 11 Januari 2011 di Kota Wamena. Edison dipukul dengan popor senjata berulang kali pada bagian kepala. Ia sempat dibawa ke rumah sakit tetapi kondisinya sangat buruk. Ia meninggal dunia di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Wamena.⁶⁵

Represi aparat keamanan dalam beragam kasus di Tanah Papua pada 2017, seperti pada kasus penembakan di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, lalu kasus penembakan dan penyiksaan di Dogiyai, berakhir tanpa ada penegakan hukum kepada pelaku secara serius. Kasus di Oneibo, misalnya, proses hukum yang dilakukan sebatas melalui sidang kode etik militer.

Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicetuskan PBB pada 10 Desember 1948 telah menegaskan perlawanan terhadap penyiksaan dan kekejaman kepada manusia, yang tertuang pada pasal 3-5.⁶⁶ Dokumen yang memuat ketentuan hak asasi manusia tampaknya diabaikan oleh Pemerintah Indonesia, dan ini ironi sebagai anggota negara-negara PBB. Bahkan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak-hak hidup bagi warga negaranya. Sebaliknya negara tidak berhak menyiksa dan membahayakan keselamatan warga negaranya.⁶⁷

65 Lihat Laporan KNPB yang tidak dipublikasikan.

66 Lihat Deklarasi HAM 10 Desember 1948. Pada pasal 3 dikatakan "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Pasal 4 "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Dan pasal 5 "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

67 Lihat UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4. Pada pasal ini secara jelas dikatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Protes masyarakat terhadap kasus penembakan warga di Oneibo.
Foto: Abeth You/SKPKC Fransiskan Papua.



Tabel Kasus Penembakan Tahun 2017

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban
1	11/1/17	Kampung Beraf, Nimbokrang, Kabupaten Jayapura	Anggota Polres Jayapura	David Tarkouw

Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
<p>Pada 11 Januari 2017, David Tarkouw berada di rumahnya di Kampung Beraf, Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan David Tarkouw di Kantor LBH Papua, dia menceritakan bahwa anggota kepolisian dari Polres Jayapura ke rumahnya dengan senjata lengkap. Mereka menembaki pintu rumah dan dirinya. David tidak melakukan perlawanan. Dia mengangkat tangannya tanda menyerah, namun aparat kepolisian tetap melakukan penembakan. Pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan mengapa David ditangkap. Menurut pengakuannya, dia ditembak dengan senjata laras panjang oleh Komandan pasukan tersebut. Paha kirinya tertembak sebanyak dua kali dan satu kali di paha kiri ketika berada di halaman rumahnya. Dalam kondisi tertembak, aparat kepolisian meminta David untuk berdiri tetapi David menjawab, "<i>tulang paha sudah patah jadi saya tidak bisa berdiri.</i>"</p> <p>Selanjutnya, aparat kepolisian menarik dan menyeret David dari halaman rumah menuju ke mobil patroli. Tindakan ini dilakukan di depan orang tua, istri dan anak-anak dari David Tarkouw. Dalam perjalanan menuju ke Mapolres Jayapura di Doyo, Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Waibron, aparat kepolisian menembak lagi kaki David Tarkouw. Penembakan ini menyebabkan kondisinya lemah. Setibanya di Mapolres Jayapura, aparat kepolisian mengantar David ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura.</p> <p>David dituduh oleh Kapolsek Nimbokrang terlibat dalam kasus pada 2011. Menurut pengakuan David, dia adalah korban dari isu tersebut. Penangkapan ini tidak ada surat perintah dari pihak kepolisian. Padahal, sebelum kejadian David selalu pergi ke kota Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan di tempat umum lainnya. David harus menggunakan dua tongkat untuk berjalan dan masih melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Kota Jayapura.</p>	<p>Korban didampingi LBH Papua dan urusan kelanjutan pemeriksaan kesehatan didampingi SKPKC Fransiskan Papua</p>	<p>Laporan LBH Papua, KPKC Sinode GKI Papua dan SKPKC FP</p>

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban
2	11/1/17	Wamena	Anggota Polres Jayawijaya	Edison Hesegem
3	24/1/17	Kabupaten Dogiyai	Gabungan TNI dan Polri	Pekey
4	27/3/17	Kepulauan Yapen	Anggota Polres Yapen	Michael Merani
5	1/8/17	Kampung Oneibo, Distrik Tigi Selatan, Kabupaten Deiyai	Brimob BKO Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulianus Pigai (27 thn): meninggal 2. Delian Pekei (20 thn) 3. Yohanes Package (29 thn) 4. Albertus Mote (11 thn) 5. Esebius Package (14 thn) 6. Yunior Package (15 thn), Kelas 2 SMP

Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
Seorang pemuda di Wamena bernama Edison Hese gem dilaporkan meninggal dunia karena dianiaya oleh 6 anggota polisi dari Polres Jayawijaya. Edison dianiaya dan dipukul berulang-ulang dengan popor senjata pada bagian kepala. Korban menghembuskan napas terakhir di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Wamena pada 11 Januari 2017.		Laporan KNPB
Aparat gabungan (TNI-Polri) menggelar aksi 'Sweeping Mantap Praja' di Kabupaten Dogiyai, yang disertai tindakan penyiksaan kepada puluhan masyarakat. Akibatnya, beberapa orang meninggal dunia, lalu mengalami luka ringan dan berat. Salah satu korban bernama Pekey, yang saat itu melakukan perjalanan ke Nabire (10 Januari 2017) ditahan oleh aparat gabungan. Pekey kemudian dipukul sampai babak belur dan dibawa ke Mapolsek Moenamani. Pada pukul 16.00 WIT, Pekey meninggal dunia ketika tiba di rumahnya. Aksi ini dikecam oleh pihak Gereja dan masyarakat Dogiyai. Selain sweeping alat tajam, aparat keamanan juga mengambil uang yang dibawa oleh masyarakat	Uskup Keuskupan Timika Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr mengecam tindakan penyiksaan tersebut.	Laporan Solidaritas Peduli HAM (SPHAM) Deiyai dan Laporan SKP Keuskupan Timika
Seorang tokoh gerakan pro-kemerdekaan Michael Merani ditembak dan disiksa ketika dalam perjalanan ke Mapolres Yapen pada 27 Maret 2017. Tidak jelas dimana persisnya Michael meninggal dunia, namun dugaan kuat ia meninggal karena tertembak dan mengalami siksaan.		Laporan SKP Keuskupan Timika
Pada Selasa, 1 Agustus 2017, Pukul 07.30 WIT, beberapa warga dari Kampung Oneibo pergi ke kali (sungai) untuk mandi dan menangkap ikan, lokasinya berdekatan dengan proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh PT Putra Dewa Paniai. Salah satu warga, Kasianus Douw tenggelam di Kali Oneibo itu. Teman-temannya berusaha menyelamatkan Kasianus. Setelah berhasil menyelamatkan Kasianus, salah satu dari mereka meminta bantuan ke salah satu karyawan PT Putra Dewa Paniai yang sedang mengerjakan jembatan. Mereka meminta bantuan mobil untuk membawa Kasianus ke Rumah Sakit. Dalam percakapan, karyawan itu menolak untuk memberikan jasa angkutan. Karena ditolak salah satu dari antara teman korban mencari bantuan mobil di Terminal Waghete.		

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban
				7. Amos Pakage (27 thn) 8. Marius Dogopia (21 thn) 9. Penias Pakage (14 thn), siswa kelas 2 SMP 10. Titus Pekei (30 thn) 11. Meky Pakage (14 thn), siswa kelas 2 SMP
6	9/8/17	Pelabuhan Paumako, Kabupaten Mimika		Theo

Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
<p>Di dalam perjalanan Kasianus meninggal dunia. Meninggalnya Kasianus membangkitkan kemarahan warga Oneibo terhadap PT Putra Dewa Paniai. Mereka merusak camp karyawan perusahaan tersebut. Pihak perusahaan meminta bantuan aparat keamanan (Brimob) untuk mengatasi kemarahan warga. Pada kesempatan itu Brimob menembak warga yang menyebabkan Yulianus Pigai meninggal dan ke-11 warga lainnya mengalami luka tembak.</p>	<p>Penyelesaian kasus ini adalah anggota yang melakukan penembakan diberi hukuman meminta maaf dan dimutasi. Selain itu ada kesepakatan PT Putra Dewa Paniai harus angkat kaki dari Deiyai.</p> <p>Pihak Gereja Katolik dalam hal ini Uskup Keuskupan Timika Mgr. Jhon Saklil, Pr telah mengeluarkan pernyataan sikap dan mengancam peristiwa tersebut.</p>	<p>Laporan SKP Keuskupan Timika, Laoran KPKC Kingmi, Laporan SKPKC FP dan media Satu Harapan, Tabloid (Koran) Jubi.</p>
<p>Pada 9 Agustus 2017, kurang lebih pukul 14.30-15.00 WIT; Perlahan-lahan perahu-perahu nelayan semi modern kembali ke pelabuhan bersama dengan beberapa nelayan pribumi yang terus mengiring mereka. Tidak lama kemudian, Ketua nelayan pendatang menelepon Ketua RT Paomako, dan menyampaikan bahwa nelayan pribumi sedang menyita-menahan perahu-perahu para nelayan pendatang. Karena ingin segera memastikan peralatan para nelayan pendatang yang disita, maka 2 pimpinan nelayan pendatang (Pak Semi dan Pak Budi) beserta rombongannya mencari Pak RT Paomako.</p> <p>Dan setelah bertemu dengan Pak RT di sekitar Pos Polisi Paomako, kemudian Pak RT diajak untuk berbicara di dalam Pos Polisi. Pada waktu itu, rombongan para nelayan pendatang sudah penuh menutupi jalan masuk-portal pintu pos. Sedangkan rombongan nelayan pribumi ada di luar, di sekitar kios-kios panjang di seberang jalan. Lalu terjadi pertengkaran mulut antara kedua belah pihak. Pak Semi, yang sudah emosi, lalu keluar dari Pos Polisi tanpa pamit, mendatangi seorang nelayan pribumi, merampas botol yang dipegang oleh nelayan itu, dan lalu memukul kepala nelayan itu dengan botol.</p>		<p>Laporan SKP Keuskupan Timika</p>

No	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Pelaku	Korban
7	5/10/17	Kampung Moso, daerah Perbatasan PNG	Anggota Yonif 432 Kostrad Makassar	Alfred Mandowen
8	25/12/17	Kabupaten Mappi	Anggota Polres Mappi	Nikolaus Bernolpus

Kronologis kejadian	Bentuk advokasi	Sumber
<p>Maka marahlah warga nelayan setempat, lalu mulai menyerang Pak Semi dan rombongan di halaman Pos Polisi. Lalu terdengarlah suara tembakan sekitar 3 kali. Seorang pemuda yang berdiri di dekat tiang bendera bernama Theo, kemudian menyampaikan kepada Pak RT yang ada di dekatnya, bahwa dia (Theo), sudah ditembak. Kemudian Theo pun terjatuh dan meninggal dunia di tempat.</p> <p>Melihat kejadian itu, warga masyarakat Paomako menjadi marah, lalu masuk ke dalam Pos Polisi, mengejar, mencari Pak Semi dan rombongan termasuk penembak di sekitar Pos Polisi. Dan dalam upaya pengejaran itu, mereka merusak fasilitas dalam Pos dan sebuah mobil pick up hitam yang sedang parkir di sekitar dan menganiaya seorang anggota militer yang diduga sebagai penembak.</p> <p>Polisi kemudian mengevakuasi Theo dan Rudi yang juga ditembak pada tangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.</p>		
<p>Kamis, 5 Oktober 2017 pukul 17.30 waktu Papua, seorang warga asal Moso bernama Alfred Mandowen mengendarai sepeda motor dalam perjalanan kembali ke Moso setelah membeli bensin. Kurang lebih 70 meter dari pos militer Yonif Para Raider 432 Kostrad Makassar pukul 18.00, berdiri enam tentara dengan menggunakan seragam dan bersenjata. Tiba-tiba menghentikan Alfred. Alfred sempat mengatakan kepada para tentara bahwa dia ingin pulang ke rumah untuk istirahat. Tapi, tiba-tiba seorang anggota militer menendang Alfred Mandowen di punggungnya sehingga dia terjatuh dari sepeda motor. Datang anggota yang lainnya memukul Alfred dengan senjata di bahu kanan dan kiri.</p>		<p>Laporan KPKC Sinode GKI Papua</p>
<p>Pada Perayaan Natal 25 Desember 2017, seorang pelajar Nikolaus Bernolpus (19) ditembak hingga meninggal dunia oleh anggota kepolisian Polres Mappi Bripka DE.</p> <p>Pistiwa ini masih menjadi pertanyaan dan harus dialami terkait apakah benar warga yang melakukan penyerangan yang berakibat pada penembakan tersebut. Sementara menurut Kapolres Mappi AKBP Wartono, penembakan itu terjadi karena ada perkelahian. Aparat kepolisian tidak menerima teguran dari korban sehingga pelaku melakukan penembakan.</p>		<p>Laporan SKP Keuskupan Agung Merauke, http://tabloidjubi.com/m/artikel-12669-keuskupan-agung-merauke-pelaku-penembakan-remaja-di-mappi-harus-diperiksakan-kejiwaannya.html dan http://www.liputan24.com/2017/12/keuskupan-agung-merauke-pelaku.html</p>



Ferdinand Tebay, salah satu korban pemukulan oleh aparat keamanan saat melakukan sweeping di Dogiyai pada 20 Januari 2017.
Foto: Istimewa/Koleksi SKPKC Fransiskan Papua

REKOMENDASI

Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia

1. Kapolri dan Panglima TNI menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai prosedur atau hukum yang harus dipatuhi oleh personil kepolisian dan tentara yang bertugas di wilayah Papua.
2. Polri dan TNI AD melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang profesional kepada personil polisi dan tentara yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan kekerasan.
3. Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) meningkatkan pengawasan dan pemahaman penyelewengan anggota kepolisian yang berpotensi melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Polri dan TNI melakukan penegakan hukum secara profesional kepada personil yang melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta tindakan lain yang bertentangan prinsip-prinsip HAM; penyiksaan, teror, intimidasi, dan diskriminasi.
5. Mengevaluasi kebijakan penempatan personil kepolisian dan tentara di Papua, dengan memperhatikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
6. Mengevaluasi penggunaan senjata personil dalam menghadapi masyarakat sipil dan menyelesaikan konflik di Papua.

DPRP, MRP, Tokoh Agama, LSM, Dewan Adat Papua

1. Melakukan pendidikan kesadaran kepada masyarakat dalam mencari keadilan secara benar dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia tidak melalui pembayaran uang karena akan meningkatkan impunitas atau kekebalan hukum bagi pelaku.
2. Tokoh Agama dan Gereja di Tanah Papua segera mensikapi berbagai tindakan kekerasan dan penembakan yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat sipil.
3. Membentuk tim kerja yang solid antar pihak untuk mendalami kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Melakukan dokumentasi dan riset mendalam kasus-kasus hak asasi manusia dan melaporkan temuan-temuannya kepada publik, dan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikannya.
5. DPRP berani melakukan pengawasan dan tekanan kepada aparat keamanan yang melakukan tindakan represi kepada masyarakat.
6. Majelis Rakyat Papua (MRP) merespon dengan tepat dan cepat berbagai peristiwa konflik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Bab 6

Proyek Sawit dan Emas: Berkah atau Kutukan



Tanah Papua merupakan tanah yang subur dan berlimpah sumber daya alamnya. Istilah atau sebutan ini sudah menjadi terbiasa dan kebanggaan bagi orang Asli Papua dan orang luar yang masuk dan mendiami Tanah Papua. Tanah yang kaya juga biasanya mengundang para pencari pekerjaan dan perusahaan untuk mengadu keberuntungannya di Tanah Papua.

Persoalan-persoalan yang dikisahkan di dalam tulisan ini, selain kejadian di tahun 2017 tetapi juga cerita tahun-tahun sebelumnya yang masih saling berkaitan. Mulai dari proses perijinan yang bermasalah, pengambilan lahan secara sepihak, pembungkaman disertai teror, pembunuhan terhadap masyarakat, protes masyarakat pemilik ulayat dan perusakan lingkungan menjadi cerita-cerita pilu kehadiran investasi di Tanah Papua.



Protes masyarakat terhadap perusahaan tambang emas Freeport.
Foto: Bernard Kotenn/SKPKC Fransiskan Papua.



TUTUP
FREEPORT

TUTUP
FREEPORT
DARI PAPUA

TANPA
TNI/POLRI
DARI PAPUA

TUTUP
FREEPORT
DARI PAPUA

TUTUP
FREEPORT

FREEPORT

FRONT PERSNU
Gempapapua
TUNTUT
FREEPORT, BP
1. TUTUSIAAN DI AT
K'
2. TNI/POLRI ORG
JLAK RENCANA PEM
4. FREEPORT WAJIB MER
5. USUT, TANGKAP, ADILI
PAPUA
6. BIARKAN RAKYAT DAN
KEKAYAAN ALAM DI TA
7. BERIKAN HAK MENENT
INDONESIA

Proyek Investasi Di Tanah Papua

Pada 2017, tanah Papua terus dirambah oleh dunia investasi sawit. Berdasarkan laporan bersama “Catatan Akhir Tahun 2017”⁶⁸ yang dikeluarkan pada Januari 2018, mencatat bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan kepada tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri pangan. Ketiga perusahaan yang mendapatkan izin pada Juli 2017 adalah PT Bangun Mappi Mandiri (Kabupaten Mappi, dengan luasan lahan 18.006 Ha), PT Agriprima Cipta Persada (Kabupaten Merauke, dengan luasan lahan 6.200 Ha) dan PT Menara Wasior (Kabupaten Teluk Wondama dengan luasan lahan 28.880 Ha) pada September 2017.

Pada Maret 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan surat keputusan Nomor 172/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung Momi Anggi di Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan, seluas 2.318 Ha menjadi hutan produksi konversi (HPK) seluas 231 Ha dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 2.100 Ha. Keputusan ini diduga untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang pasir kuarsa PT SDIC. Izin ini bertolak belakang dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2013, yang meminta agar hutan tersebut dijadikan sebagai areal penggunaan lain karena di sekitar lahan tersebut terdapat perkampungan masyarakat. Tetapi, hal ini tidak direstui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.⁶⁹

Kasus-kasus pembabatan hutan dan pemaksaan penguasaan lahan untuk proyek perkebunan dan pertambangan terus menerus terjadi dan tidak terselesaikan, hingga menjadi persoalan serius berkepanjangan di kalangan masyarakat. Masih teringat dengan Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, perusahaan kelapa sawit PT Nabire Baru, PT Permata Putra Mandiri di Kabupaten Sorong Selatan, PT Tandan Sawita Papua di Kabupaten Keerom, PT Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak, PT Sinar Mas di Kabupaten Jayapura dan lain sebagainya. Kehadiran para investor ini selalu menjadi mimpi buruk bagi pemilik ulayat dan mimpi manis untuk para elit atau pejabat Papua maupun pusat.

Di Kabupaten Nabire, kehadiran PT Nabire Baru sangat mencemaskan masyarakat hak pemilik ulayat yakni Suku Yerisiam Gua. Pengalihfungsian hutan dari pengelolaan kayu menjadi kebun sawit tidak mendapat persetujuan dari masyarakat. Atau dengan kata lain, tidak ada pembicaraan yang jelas antara perusahaan dengan

68 Lihat laporan Catatan Akhir Tahun 2017: Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua oleh Walhi Papua, Pusaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI Papua, SKPKC FP dan SKP Keuskupan Agung Merauke. Lapornya bisa diakses pada <http://fransiskanpapua.org/2018/01/03/perampasan-tanah-laporan-tahun-2017/>

69 *Ibid.*

masyarakat pemilik ulayat. Berdasarkan laporan dan pengakuan masyarakat, PT Nabire Baru membatasi hutan dan mengubahnya menjadi kebun sawit tidak mendapat persetujuan. Melalui Surat Keputusan Nomor 187 tahun 2009, Bupati Nabire memberikan keleluasaan kepada PT Nabire Baru untuk membatasi dan menggunakan lahan seluas 17.000 hektare yang terletak di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Tahun sebelumnya, 2008, Pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur Papua Barnabas Suebu memberikan izin kepada PT Nabire Baru dengan mengeluarkan SK Nomor 142 tahun 2008. Padahal pada 2007 masyarakat tidak mau melepaskan tanah mereka.⁷⁰ Perusahaan ini terus melakukan pembatasan lahan milik masyarakat Suku Yerisiam, bahkan menebang Dusun Sagu Keramat milik masyarakat.⁷¹

Persoalan lain di Nabire adalah perusahaan tambang emas PT Kristalin Eka Lestari dan PT Pasific Mining Jaya yang beroperasi di Kampung Nifasi, Nabire. Kedua perusahaan tambang ini sangat meresahkan masyarakat. Menurut Tino Hanebora, tokoh masyarakat Suku Yerisiam, informasi izin pengoperasian investor di daerahnya ditutupi oleh pemerintah dan investor. Masyarakat yang berusaha mencari informasi lahan dan hutan yang menjadi lahan dan wilayah penambangan itu diintimidasi aparat keamanan yang disewa perusahaan.⁷²

Pada 2017 Pemerintah telah menerbitkan izin baru kepada sejumlah perusahaan pertambangan di provinsi Papua, antara lain: PT Wira Emas Persada di Kabupaten Nabire (perusahaan yang mengeksplorasi logam DMP, 1.242 Ha), PT Aurum Wira Persada di Kabupaten Nabire perusahaan yang mengeksplorasi logam DMP, 13.880 Ha), PT Trident Global Gramindo (perusahaan yang mengeksplorasi logam DMP, 17.830 Ha) dan PT Madinah Qurrata'ain di Kabupaten Dogiyai (perusahaan yang mengeksplorasi emas DMP, 23.340 Ha). Lalu di provinsi Papua Barat ada PT Bayu Khatulistiwa Sejahtera di Manokwari (perusahaan yang mengeksplorasi emas, 7.741 Ha) dan PT Dharma Nusa Persada yang mengeksplorasi emas, 20.805 Ha.⁷³

Kasus perampasan tanah dan hutan rakyat juga terjadi di kawasan kepala burung Pulau Papua, khususnya di Sorong Raya dan Fakfak. Perusahaan didukung pemerintah setempat telah membatasi hutan dan memakai tanah adat secara sepihak. Di Fakfak, Pemerintah Daerah memberikan izin kepada PT Rimbun Sawit untuk menggarap

70 Lihat Laporan Kronologis Perusahaan Kelapa Sawit PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire oleh Solidaritas Korban Investasi Yerisiam Gua Nabire. Laporan ini bisa diakses juga di <http://fransiskanpapua.org/2017/04/29/laporan-kronologis-kasus-kelapa-sawit-di-nabire/>

71 Lihat <http://tabloidjubi.com/m/artikel-4492-ptnabire-baru-dan-ptsariwana-adhi-perkasa-terus-buka-lahan-baru.html>, diakses pada 19 Januari 2018

72 Lihat <http://www.mongabay.co.id/2017/04/18/suku-yerisiam-tolak-tambang-emas-pasific-mining-jaya-di-nabire/>, diakses Jumat, 22 Juni 2018

73 *Op.Cit.*, Catatan Akhir Tahun 2017 tentang "Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua" oleh Walhi Papua, Pusaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI Papua, SKPKC FP dan SKP Keuskupan Agung Merauke, lihat pada <http://fransiskanpapua.org/2018/01/03/perampasan-tanah-laporan-tahun-2017/>

Perkebunan sawit di Papua. Foto: Istimewa



wilayah Kampung Bima Jaya dan Otoweri, Distrik Bomberai. Berdasarkan izin Pemerintah Daerah Fakfak, PT Rimbun Sawit membat lahan seluas 21.015,52 Ha.⁷⁴ Pemberian izin ini melahirkan konflik di antara masyarakat dan masyarakat dengan perusahaan yang didukung aparat keamanan. Di Kabupaten Sorong, Pemerintah Sorong memberikan izin perusahaan sawit PT Mega Mustika Plantation untuk membat lahan seluas 9.835 Ha.

Di daerah selatan Papua (Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel) pemerintah menerbitkan izin bagi proyek proyek MIFEE dan perusahaan sawit lainnya. Program MIFEE ini secara resmi disahkan pada 11 Agustus 2011. Sekitar 50 izin lokasi di Selatan Papua dikeluarkan untuk 20 kelompok perusahaan yang berasal dari Indonesia dan Korea Selatan.⁷⁵

Hingga kini, pembabatan hutan di Papua bagian selatan terus dilakukan. Para investor atau perusahaan dengan berbagai cara, bahkan dengan licik memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuannya, membujuk masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Perusahaan menghamburkan janji manis dan merebut harta masyarakat. Di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, lahan atau hutan milik Suku Yei dibabat oleh dua perusahaan Sawit yakni PT Internusa Jaya Sejahtera dan PT Agripima Persada Mulia.⁷⁶

Dampak Negatif Investasi

Kehadiran para investor di Tanah Papua membawa kehancuran baik itu manusia maupun lahan atau hutan masyarakat asli Papua. Berikut ini beberapa kehancuran, kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh kehadiran perusahaan pada tahun 2017:

Masyarakat pemilik ulayat kehilangan hak ulayatnya; atas hutan atau lahan

⁷⁴ Lihat Laporan Koalisi Masyarakat Fakfak yang tidak dipublikasikan.

⁷⁵ Lihat <https://awasmiffee.potager.org/?p=650&lang=id>, diakses pada 2 Juli 2018. Nama-nama perusahaan yang terlibat di dalam MIFEE adalah 1. Medco (Perusahaan gas dan minyak Indonesia), 2. LG International (TNC Korea, terkenal dengan produk-produk elektroniknya), 3. Rajawali (Konglomerasi bisnis Indonesia), 4. Daewoo International (Bagian dari TNC Posco Korea Selatan), 5. Korindo (Konglomerasi bisnis Korsel dengan beragam bisnis di Indonesia), 6. Wilmar International (Perkebunan Asia dan raksasa perdagangan komoditas pangan), 7. AMS Plantations (Perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Ganda Sitorus, adik pendiri Wilmar Martua Sitorus), 8. Astra Agro Lestari (Perusahaan perkebunan Indonesia, dimiliki oleh perusahaan Inggris yang terdaftar di Bursa Efek London; Jardine Matheson), 9. Mayora (Perusahaan makanan Indonesia), 10. China Gate Agriculture Development (Perusahaan misterius, juga dari Korea Selatan), 11. Moorim Paper (Perusahaan kertas Korea), 12. Central Cipta Murdaya (Konglomerasi Indonesia – sang bos dipenjara karena menyogok izin perkebunan namun bisnisnya masih berjalan lancar), 13. Texmaco (Konglomerasi Indonesia yang fokus pada perhutanan).

⁷⁶ Lihat <https://awasmiffee.potager.org/?p=1465&lang=id>, diakses pada 23 Mei 2018

keramat/sakral yang dihormati turun-temurun dan dijadikan tempat ritual adat. Sebagian besar dampak buruk di tanah dan hutan adat ini berasal dari para investor atau perusahaan. Hal ini dialami oleh masyarakat Suku Yerisiam Gua (Kabupaten Nabire), Suku Yei (Kabupaten Merauke), Suku Yeti dan Kriku (Kabupaten Keerom), Suku Moi (Kabupaten Sorong), Suku Mbaham Mattah (Kabupaten Fakfak).

Masyarakat yang melawan dan mempertahankan lahannya, diteror, diintimidasi, ditembak dan mengalami kekerasan fisik lainnya. Pelaku dari tindakan buruk itu adalah perusahaan melalui aparat keamanan yang disewanya. Misalnya, kasus yang dialami oleh Yan Ever Mengge pada 23 Oktober 2017 di Kabupaten Sorong Selatan. Kekerasan terjadi ketika masyarakat melakukan pemalangan dan menuntut perusahaan membayar kerugian. Perusahaan PT Permata Putera Mandiri menggunakan Brimob untuk memukul dan menendang Yan Ever.⁷⁷ Peristiwa yang sama juga dialami oleh Sekretaris Dewan Adat Yerisiam Gua Robertino Hanebora pada 29 Juni 2017 di Kabupaten Nabire.

Persoalan pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan masih dialami oleh masyarakat. Kasus PHK dialami pekerja dari Kampung Malalis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, yang bekerja di PT Henrison Inti Persada, karena menuntut haknya.⁷⁸ Lalu sebanyak 164 karyawan bekerja pada PT Viktori Cemerlang unit Nimbontong, Kabupaten Jayapura di-PHK secara sepihak dan gaji atau honor karyawan tidak dibayar selama empat bulan, uang pesangon pun tak diberikan. Masalah ini sebelumnya telah dibahas oleh perusahaan dan pemerintah setempat, tetapi tak mengubah nasib baik karyawan.⁷⁹

Protes dan Perlawanan Masyarakat

Derasnya arus investor ke Tanah Papua tidak serta-merta didukung oleh masyarakat pemilik ulayat. Masyarakat pemilik tanah ulayat dan hutan terus berusaha berjuang dan melakukan perlawanan. Masyarakat pemilik tanah ulayat ini didukung oleh organisasi mahasiswa yang peduli akan nasib lingkungan dan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak atas tanah ulayat. Seperti tahun sebelumnya, pada 2017 masyarakat terus melawan ketidakadilan terhadap lahannya.

77 *Op.Cit.*, Catatan Akhir Tahun 2017: "Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua" oleh Walhi Papua, Pusaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI Papua, SKPKC FP dan SKP Keuskupan Agung Merauke. Lapornya bisa diakses pada <http://fransiskanpapua.org/2018/01/03/perampasan-tanah-laporan-tahun-2017/>

78 Lihat <https://awasmiffee.potager.org/?p=1516&lang=id>, diakses pada 23 Mei 2018

79 Lihat <http://fransiskanpapua.org/2017/06/23/phk-pekerja-sepihak-oleh-pt-victori-cemerlang/>, diakses pada 23 Mei 2018

Masyarakat Adat Yerisiam Gua Nabire, misalnya, terus melakukan aksi protes terhadap kehadiran perusahaan tambang emas di Sungai Mosairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire pada 18 Maret 2017. Masyarakat memprotes kehadiran perusahaan tambang emas PT Kristalin Eka Lestari di wilayahnya.⁸⁰

Lalu masyarakat Suku Moi dari Distrik Klaso, Saengkeduk dan Distrik Persiapan Selebo, Kabupaten Sorong, melakukan aksi palang jalan di Perempatan jalan masuk Ibu kota Distrik Klaso pada 22 Maret 2017. Aksi ini merupakan protes warga terhadap kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation.⁸¹

Aksi protes juga dilakukan oleh Masyarakat Adat Independen (MAI) di Kabupaten Mimika. Pada Maret dan April 2017 MAI melakukan aksi turun jalan memprotes perampasan lahan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Aksi ini sebagai protes pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak manajemen PT Freeport sejak Februari 2017.⁸² Selain di Timika, aksi yang sama juga dilakukan di Kota Jayapura, Bandung, Yogyakarta, Manado, Bogor, Palu dan Jakarta yang dimotori oleh Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport. Walaupun tuntutan yang agak berbeda tetapi massa aksi tetap menginginkan PT Freeport segera ditutup.⁸³

Pada Juni 2017, masyarakat adat Yimnawai Gir di Arso, Kabupaten Keerom melakukan aksi demonstrasi di Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT PN II dan Kantor Bupati Keerom. Masyarakat meminta pemerintah dan perusahaan mengembalikan lahan 50.000 yang dirampas untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1980.⁸⁴

Kasus perampasan tanah adat terus memicu gelombang protes masyarakat dari suku-suku pemilik tanah ulayat. Puluhan warga Suku Yerisiam dari Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire melakukan demonstrasi di gedung DPRD Nabire pada Oktober 2017. Masyarakat menuntut pemerintah menghentikan perampasan tanah adat dan mendesak pemerintah mencabut izin usaha tambang di wilayah adat Yerisiam, karena perusahaan menjalankan operasi tambang tanpa konsultasi dengan masyarakat.⁸⁵

80 Lihat <http://fransiskanpapua.org/2017/04/28/solidaritas-untuk-masyarakat-adat-nifasi-kabupaten-nabire/>, diakses pada 28 April 2017

81 Lihat <https://awasmiffee.potager.org/?p=1516&lang=id>, <http://www.mongabay.co.id/2017/03/29/tolak-perkebunan-sawit-masyarakat-adat-moi-palang-jalan/>, diakses 23 April 2018

82 *Op.Cit.*, Catatan Akhir Tahun 2017 tentang “Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua” oleh Walhi Papua, Pusaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI Papua, SKPKC FP dan SKP Keuskupan Agung Merauke.

83 Lihat <http://fransiskanpapua.org/2017/04/28/solidaritas-mahasiswa-untuk-sebuah-perubahan-front-persatuan-mahasiswa-tutup-freeport-fpm-tf/>, diakses 28 April 2018

84 *Op.Cit.*, Catatan Akhir Tahun 2017 tentang “Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua” oleh Walhi Papua, Pusaka, Jerat Papua, KPKC Sinode GKI Papua, SKPKC FP dan SKP Keuskupan Agung Merauke.

85 *Ibid.*,

Gelombang protes penolakan izin tambang terus terjadi hingga jelang akhir 2017. Perwakilan Suku Yerisiam Gua dan Suku Wate dari Nabire, bergabung dengan puluhan massa aksi dari organisasi mahasiswa dan pemuda Papua di Kota Jayapura, melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Papua pada November 2017. Massa menuntut Gubernur Papua mencabut 52 izin usaha pertambangan di Papua. Massa aksi menuntut Gubernur untuk melindungi usaha tambang rakyat skala kecil yang diusahakan oleh pengusaha dan masyarakat adat Papua.⁸⁶

Kemudian pada 30 November 2017, Front Pembela Peduli Lembah Kebar di Manokwari melakukan aksi demonstrasi di Kantor MRPB di Manokwari. Massa menolak SK Menteri Kehutanan Nomor 837/MENHUT-II/2014 tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP), seluas 19,368 hektare di Kebar dan Senopi, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Massa protes karena izin yang diberikan tanpa diketahui dan melibatkan masyarakat adat setempat.⁸⁷

Kasus perampasan tanah dan hutan adat kembali diangkat dalam perayaan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2017 yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua Selatan di Kota Merauke. Aliansi mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Merauke pada 11 Desember 2017, menyuarakan penolakan program MIFEE karena telah merampas tanah dan hutan adat di Papua selatan hingga mencapai 1,2 juta hektare. Selain itu, massa meminta pemerintah menghentikan izin perusahaan yang melanggar HAM dan merusak hutan, termasuk menutup perusahaan milik PT. Korindo Group.⁸⁸

Kasus-kasus perampasan tanah dan hutan adat di Papua dilakukan oleh berbagai perusahaan, investor dan didukung kebijakan pemerintahan provinsi dan kabupaten dalam pemberian izin operasional, tanpa melihat aspek-aspek di lapangan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, terutama dalam berbagai kasus penguasaan tanah atau lahan pertambangan.

Kebijakan dan tindakan semena-mena oleh investor telah menyingkirkan akar kehidupan para penduduk pemilih tanah ulayat. Bahkan, perampasan lahan dan penguasaan tanah cenderung merusak lingkungan dan hutan. Berbagai gerakan protes yang dilakukan masyarakat adalah upaya memperjuangkan dan merebut kembali hak-hak kepemilikan tanah harus mendapatkan perhatian serius para pemimpin di Tanah Papua. Perjuangan itu untuk menjaga masa depan anak-anak atau generasi muda Papua.

86 *Ibid.*,

87 *Ibid.*,

88 *Ibid.*, Lihat juga di <http://fransiskanpapua.org/2017/12/12/tuntutan-dari-papua-selatan/>, diakses pada 12 Desember 2017.

REKOMENDASI

Investor, Perusahaan

1. Perusahaan wajib memperhatikan dan mengutamakan HAM dalam berinvestasi di Tanah Papua.
2. Perusahaan wajib mengembalikan hak ulayat yang sudah digunakan tanpa pengakuan dan persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat.
3. Perusahaan wajib memberdayakan masyarakat setempat, pemilik hak ulayat berdasarkan sumber daya yang dimiliki.
4. Perusahaan wajib dan secara terbuka menerima segala pengaduan masyarakat pemilik hak ulayat.
5. Perusahaan tidak perlu menggunakan aparat keamanan ketika mengatasi pengaduan masyarakat pemilik hak ulayat.
6. Perusahaan wajib memperhatikan hak-hak para pekerja berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku.

Pemerintah: Pusat, Provinsi, Kabupaten

1. Pemerintah (pusat dan daerah) secara tegas menghentikan dan mencabut izin operasi semua perusahaan yang tidak taat HAM dan merusak lingkungan.
2. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi segala pengaduan masyarakat pemilik hak ulayat.
3. Pemerintah daerah wajib menyusun, menerbitkan dan melaksanakan Perda atau Perdasus tentang hutan konservasi dan perlindungan terhadap masyarakat pemilik ulayat.
4. Pemerintah (pusat dan daerah) wajib melaksanakan segala peraturan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup secara benar, konsisten dan bertanggung jawab.
5. Pemerintah daerah (dinas terkait) wajib melindungi para pekerja yang bekerja di semua perusahaan di Tanah Papua.
6. Pemerintah (pusat dan daerah) secara tertib, benar dan tidak semena-mena menerbitkan izin perusahaan-perusahaan di Tanah Papua.

Bab 7

**Dunia Internasional
Terus Memantau
Hak Asasi Manusia
di Papua**



Pemerintah Indonesia tampak ‘gusar’ menghadapi tudingan pelanggaran hak asasi manusia di forum dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah negara Pasifik menyuarkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mendesak Indonesia untuk menghentikan aksi-aksi pembunuhan orang-orang asli Papua dan menyelesaikannya secara terbuka dan damai.

Pemerintah Indonesia didesak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat: pembunuhan terhadap orang-orang Papua, pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan berbagai tindakan kekerasan serta sewenang-wenang.

BANYAKNYA pelanggaran HAM di Tanah Papua yang tidak diselesaikan hingga saat ini turut menjadi pendorong kuatnya desakan dunia internasional kepada Indonesia untuk memperhatikan persoalan hak asasi manusia di Papua. Beberapa tahun ini, suara mendesak dan meminta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua datang dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dan sejumlah negara di belahan Eropa.

Dalam Sidang Tahunan PBB dalam Universal Periodic Review (UPR) pada Mei 2017 di Jenewa, Swis, sejumlah negara mempertanyakan niat baik dari Negara Indonesia untuk menangani derasnya pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ada lima negara yang mempertanyakan dan menilai kinerja Pemerintah Indonesia di bidang penegakkan hak asasi manusia, yaitu Jerman, Kanada, Inggris, Belanda dan Prancis.⁸⁹

Pada kasus pelanggaran HAM di Papua, Pemerintah Indonesia tak menunjukkan etiket serius, bahkan justru menganggap atau menutup-nutupi dan menyangkal adanya pelanggaran HAM di Papua. Sikap dan penjelasan Pemerintah Indonesia itu bertolak belakang dengan beragam fakta dan peristiwa hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua.

Sikap dan penjelasan pemerintah yang tidak berubah dalam melihat situasi hak asasi manusia di Tanah Papua itu, menyebabkan derasnya suara-suara dari negara-negara yang memberikan kepedulian terhadap masalah Papua di berbagai forum internasional.

Perhatian negara-negara Pasifik di forum dunia PBB bukan hanya terjadi pada tahun 2017, namun beberapa tahun sebelumnya juga dilakukan. Pada 26 Juni 2015, bertepatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-20 di Honiara, Salomon Islands, para pimpinan negara-negara yang tergabung dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) menerima United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat.⁹⁰ Hal ini menunjukkan negara-negara Melanesia semakin kuat memberikan perhatian terhadap persoalan Papua. Lalu, pada 14 Agustus 2015, Pacific Islands Forum Secretariat's Special Sub-Committee menegaskan masalah Papua Barat menjadi salah satu dari lima isu utama yang dibahas dalam pertemuan para pemimpin PIF di Port Moresby pada 7-11 September 2015.⁹¹

Kelima negara tersebut memberikan beberapa rekomendasi yang dititipkan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia AM Fachir, antara lain: mendesak Pemerintah Indonesia melaksanakan dialog perwakilan Papua, mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan (TNI, Polisi dan Intelijen), mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi para pembela HAM dan rakyat Papua dari tindak kekerasan, dan rekomendasi terakhir, mendesak Pemerintah Indonesia untuk

89 Lihat <http://www.viva.co.id/indepth/fokus/317484-dunia-kembali-sorot-pelanggaran-ham-di-papua>

90 Markus Haluk, "Papua Di Ambang Kepunahan: Seri Pendidikan Politik ULMWP II", 2015. Hal. 41

91 *Ibid.*, hal. 42

melibatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan di Papua.

Setahun kemudian, dalam Sidang Dewan HAM PBB pada 19 September 2016, Pemerintah Salomon dan Nauru mengangkat persoalan HAM Papua.⁹² Pemerintahan Salomon yang diwakili oleh Barret Salato menegaskan kepada Pemerintahan Indonesia agar bekerja sama dengan PBB sehingga mengizinkan Pelapor Khusus PBB di Bidang Kebebasan Berekspresi berkunjung ke Tanah Papua. Pemerintah Salomon menilai perlindungan HAM untuk masyarakat di Tanah Papua sangat perlu sehingga dibutuhkan tindakan kolektif untuk mengutuk segala pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pada 22 September 2016, Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Baqa di hadapan 193 negara anggota Majelis Umum PBB di New York mengangkat keprihatinannya terhadap situasi HAM di Tanah Papua.⁹³ Pemerintah Nauru mengharapkan agar segera dilaksanakan sebuah dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Negara Indonesia terkait persoalan HAM di Tanah Papua. Kedua negara ini merupakan bagian dari negara Pacific Islands Forum (PIF).

Selain dibahas dalam sidang PBB, persoalan Papua dibawa dan didiskusikan pada pertemuan ke-14 ACP EU Parliamentary Joint Assembly di Port Vila, Vanuatu pada 20 Juli 2017.⁹⁴ Organisasi ini beranggotakan 97 negara-negara gabungan Afrika, Caribbean dan Pasifik. Dari ke-97 negara, tujuh negara dari Pasifik membawa isu pelanggaran HAM di Papua di dalam forum tersebut. Pertemuan ini juga menghadirkan Sekretaris Jenderal ULMWP Oktovianus Mote.

Cerita dukungan lainnya juga berasal dari Gereja di luar negeri. Perwakilan Kelompok Kristen Quaker (Perkumpulan Agama Sahabat) menemui sejumlah anggota parlemen di Selandia Baru. Kelompok ini mengumpulkan dukungan dalam bentuk petisi publik yang mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk mengambil sikap dan tindakan terkait situasi HAM di Papua. Petisi yang digalang ini lebih menyoroti pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.⁹⁵ Petisi dukungan tersebut diserahkan pada 23 Maret 2017.

Dukungan Gereja di Selandia Baru yang lain datang dari Gereja-gereja Protestan yang tergabung dalam Pacific Conferences of Churches (PCC) yang dilaksanakan pada 1-3 Agustus 2017, membahas isu pelanggaran HAM di Tanah Papua. Melalui Sekretaris Jendral PCC Francois Pihaatae, meminta Indonesia untuk menghentikan pembunuhan terhadap orang asli Papua. "Menyerukan kepada Indonesia untuk menghentikan

92 Lihat <http://tabloidjubi.com/artikel-277-solomon-dan-nauru-tekan-pemerintah-indonesia-di-dua-badan-pbb.html>

93 *Ibid.*,

94 Lihat <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/7-negara-bawa-isu-papua-ke-parlemen-afrika-pasifik-dan-ue>

95 Lihat <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kelompok-kristen-quaker-ajukan-petisi-pelanggaran-ham-papua>

pembunuhan (orang Papua). Itulah satu-satunya prioritas pertama bagi kami untuk meminta militer dan kepolisian Indonesia atau apa pun yang mereka gunakan untuk membunuh. Mereka (orang Papua) bukan binatang, mereka adalah manusia seperti mereka, orang Indonesia.”⁹⁶

Selain dukungan dan desakan tentang persoalan HAM di Papua dari negara dan Gereja di kawasan Pasifik, dukungan dan desakan juga datang dari Koalisi Internasional untuk Papua atau International Coalition for Papua (ICP). Koalisi ini terdiri dari beberapa NGO tingkat internasional, nasional dan Papua, seperti Fransiscan International, Tapol Inggris, Vivat International. Dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-32 pada 22 Juni 2017 di Genewa, Swiss, ICP menyuarkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Saat itu Staf Fransiscan International Budi Tjahjono mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan secara imparial atas kasus penangkapan sewenang-wenang yang terjadi di Papua.

“Kami ingin menarik perhatian Dewan terhadap situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Sebagai salah satu daerah yang paling terpencil di dunia, Papua tetap menjadi salah satu daerah konflik terakhir di Indonesia. Aktivis lokal terus melaporkan kasus penangkapan sewenang-wenang oleh aparat keamanan Indonesia terhadap orang asli Papua yang berpartisipasi dalam pertemuan damai untuk mengekspresikan pendapat politik mereka.”⁹⁷

Pada jelang penghujung 2017, Pemerintah Indonesia semakin sibuk menghadapi petisi referendum yang diberitakan telah diserahkan oleh perwakilan ULMWP Benny Wenda ke Komite Dekolonialisasi PBB pada September 2017. Di dalam berita kabar24.bisnis.com yang mengutip laman www.abc.net.au menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia melarang petisi tersebut dan mengancam akan menangkap dan memenjarakan orang-orang yang menandatangani petisi, yang jumlahnya sekitar 1,8 juta penduduk di Tanah Papua. Kemudian menurut Juru Bicara ULMWP Beny Wenda terdapat sebanyak 57 orang ditangkap dan 54 orang disiksa oleh aparat keamanan selama kampanye petisi itu berlangsung.⁹⁸ Seperti diberitakan oleh kompas.com, Kepala Komite Dekolonialisasi PBB Rafael Ramirez menolak laporan petisi tersebut.⁹⁹ Terlepas dari benar atau tidaknya berita dan tanggapan berbagai kalangan, persoalan Papua terus diangkat dan dibahas dalam forum-forum internasional.

96 Lihat <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/gereja-gereja-pasifik-bawa-papua-ke-komite-dekolonisasi-pbb>. Lihat juga <http://tabloidjubi.com/artikel-8830-gereja-pasifik-nyatakan-dukungan-penentuan-nasib-sendiri-bangsa-west-papua.html>

97 Pernyataan Perwakilan Fransiscan Internasional pada sidang ke-32 Dewan HAM PBB, Rabu (22 Juni 2017) Budi Tjahjono. Lihat <https://indonesia.ucanews.com/2016/06/24/lsm-internasional-desak-pbb-selesaikan-pelanggaran-ham-papua/>

98 Lihat <http://kabar24.bisnis.com/read/20170929/19/694243/referendum-tuntut-papua-barat-merdeka-dipresentasikan-di-pbb>

99 Lihat <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/29/15405451/pbb-bantah-terima-petisi-referendum-papua-barat>

REKOMENDASI

Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri, Kedubes-kedubes Indonesia

1. Menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri untuk menjelaskan secara terbuka situasi dan realitas peristiwa dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua kepada forum-forum internasional, seperti PBB.
2. Menginstruksikan pendekatan yang lebih terbuka dan jujur dalam mensikapi fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua yang telah dibahas dan disuarakan oleh negara-negara Pasifik dan sejumlah negara di Eropa.
3. Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar di sejumlah negara untuk membuka diri terhadap negara-negara yang memberikan perhatian kepada pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.
4. Presiden, Kemenlu, dan Kedutaan Besar, membuka akses bagi media dan pekerja kemanusiaan asing (negara lain) untuk mengunjungi Papua.

PBB; Komite Dekolonialisasi; Dewan HAM; Utusan/Pelapor Khusus

1. Terus memantau dan menyampaikan kepada Indonesia untuk memperbaiki pendekatan keamanan yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
2. Memberikan perhatian khusus terhadap laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Papua.
3. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia secara profesional dan sesuai dengan hukum dan aturan terkait hak asasi manusia.

Organisasi Masyarakat Sipil, Tokoh Agama, Pembela HAM, Media

1. Membuat dokumentasi laporan hak asasi manusia berdasarkan fakta-fakta secara lengkap dan profesional dan diserahkan atau dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia dan Lembaga Hak Asasi Manusia di PBB.
2. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, untuk membuka akses media, pekerja kemanusiaan, dan peneliti asing terhadap wilayah Papua.
3. Media memberikan perhatian terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang mendapatkan perhatian dari dunia internasional.
4. Media secara independen melaporkan negara-negara dan berbagai pihak internasional yang membahas persoalan hak asasi manusia Papua.

Bab 8

Dialog Jakarta-Papua: Jalan Damai yang Masih Membatu



Gagasan dialog dalam menyelesaikan konflik Papua terus disuarakan, namun gaungnya naik turun. Dialog yang dikerjakan oleh Jaringan Damai Papua telah sampai di akar rumput, bahkan di teras pemimpin di Jakarta. Namun, tak kunjung dilakukan, bahkan langkah ini surut, tersendat-sendat.

Presiden Joko Widodo pernah menangkap jalan Dialog dalam penyelesaian konflik Papua. Joko Widodo mengundang tokoh-tokoh Papua ke Istana Negara membahas jalan penyelesaian Papua. Namun, lagi-lagi memunculkan pro dan kontra. Akhirnya, jalan dialog kembali kandas.

GAGASAN Dialog Jakarta-Papua awalnya digerakkan Pater Neles Keadabi Tebay, Pr, Koordinator Jaringan Damai Papua pada tahun 2000-an. Beberapa alasan mendasar dalam membumikan Dialog sebagai jalan untuk mencari persoalan di Papua adalah [1] kekerasan tidak berhasil menyelesaikan konflik Papua, [2] Implementasi UU Otonomi Khusus yang gagal, [3] Pemerintah Indonesia tidak konsisten menerapkan UU Otsus Papua, [4] Orang Papua semakin tidak mempercayai pemerintah dan [5] Dukungan internasional terhadap Pemerintah Indonesia semakin menurun.¹⁰⁰

Konsep dialog sendiri telah diuraikan dengan rapi, seperti tentang kerangka acuan dialog, prinsip, tujuan, tahapan, peserta, dan fasilitator dialog. Konsep tersebut sesungguhnya membawa angin segar untuk mencari solusi menghentikan segala kekerasan dan mencapai perdamaian di Tanah Papua. Namun sejak gagasan dialog disuarakan pada 2009 dan dideklarasikan pada 5-7 Juli 2011 dalam Konferensi Perdamaian Papua, tawaran untuk berdialog sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi Pemerintah Indonesia masih beranggapan bahwa dialog adalah media untuk melepaskan diri dari NKRI, di sisi lain masyarakat Papua masih ragu dengan tawaran dialog tersebut.

Diskusi tentang Dialog Papua-Jakarta kembali menguat pada Agustus 2017. Pada 15 Agustus 2017, Presiden RI Joko Widodo mengundang 14 orang – yang disebut sebagai perwakilan rakyat Papua–untuk bertemu dan membicarakan permasalahan di Tanah Papua. Pada kesempatan itu, selain diskusi dan desakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang baru-baru terjadi seperti penembakan di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, Presiden Joko Widodo juga membicarakan agenda dialog dengan Papua. Berawal dari penyampaian berbagai persoalan dan apa yang telah dilakukan oleh Negara di Tanah Papua, maka perwakilan pada saat itu juga menyarankan kepada Presiden Joko Widodo melaksanakan dialog sektoral.

“Kami menyarankan untuk diadakan dialog sektoral di semua bidang, semisal SDM, Kesehatan, Pendidikan dan sektor lain, ini harus duduk bersama dan mencari solusi, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun tokoh adat, agama semua terlibat sehingga semua merasa memiliki tanggungjawab”.¹⁰¹

Setelah persetujuan dan penunjukan Presiden Joko Widodo terhadap Pater Neles Tebay untuk mengadakan dialog sektoral, banyak pihak mulai memberikan komentar. Adayang menolak dan menerima gagasan. Dosen Antropologi Universitas

100 Neles Tebay, “Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua”, SKP Jayapura: 2009, hal. 1-11

101 Pernyataan Pater Dr. Neles Tebay, Pr, di dalam siaran persnya di Kompleks Kampus STFT Fajar Timur, 22 Agustus 2017, Bdk. <https://www.beritalima.com/2017/08/22/pater-neles-dialog-sektoral-perlu-dilakukan-untuk-masalah-papua/>

Cendrawasih Ibrahim Peyon menjelaskan dalam sebuah opininya “Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP dan Dukungan Internasional”¹⁰², bahwa gagasan dialog yang sedang didorong oleh Pater Neles (JDP), seperti yang mengarah ke Pepera jilid kedua. Menurut Ibrahim, apa yang dibicarakan di dalam Dialog tersebut tidak satu pun membahas pelurusan sejarah politik Papua. Ketua KNPB Viktor Yeimo di dalam ulasannya “Cara Menyikapi Dialog Sektor”¹⁰³, menjelaskan bahwa dialog sektoral adalah bahan politik pencitraan dari Jakarta. Menurut Viktor, media yang cocok untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di Tanah Papua adalah Referendum. Sedangkan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Benny Giay menjelaskan dialog antara Jakarta dengan Papua dianggap tidak akan efektif tanpa mengikutsertakan ULMWP.¹⁰⁴ Dialog tersebut juga tidak mengagendakan penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya menghentikan kekerasan di Tanah Papua.

Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Neles Tebay, Pr dalam siaran pers pada 7 September 2017, menjelaskan bahwa presiden perlu menunjuk tim dialog, seperti; siapa yang ikut dalam dialog tersebut dan siapa yang nantinya membuat dan mengirimkan undangan kepada peserta dialog sektoral.¹⁰⁵ Dialog sektoral merupakan suatu forum atau pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk membahas suatu sektor atau bidang tertentu, misalnya dialog sektor untuk pendidikan, kesehatan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya.

Diskusi tentang dialog sektoral juga dilakukan dengan mengundang para sahabat JDP pada 28–29 September 2017, untuk mulai memikirkan bagaimana proses dialog sektoral tersebut. Pada pertemuan itu, sahabat JDP yang dikelompokkan menurut tujuh wilayah adat Papua, mencoba membuat daftar persoalan dan tokoh yang terlibat untuk membahas kelima sektor yang didorong. Direktur LP3BH Manokwari Christian Warrinusy mengatakan bahwa dialog sektoral ini tidak akan menjawab persoalan di Tanah Papua. Persoalan di Papua adalah persoalan konflik (konflik kekerasan dari aparat militer ke masyarakat sipil). Dengan demikian Christian merasa pesimis bahwa Dialog Sektoral ini akan menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

“Orang Papua berbicara pelanggaran HAM tetapi dialog sektoral berbicara

102 Bdk. <http://suarapapua.com/2017/08/30/dialog-jakarta-papua-agenda-menghancurkan-ulmwp-dan-dukungan-internasional/>

103 Bdk. <https://papuapost.wordpress.com/tag/dialog-sektoral/>

104 Bdk. <http://jdp-dialog.org/berita/headline/1075-benny-giayulmwp-representasi-papua-berdialog-dengan-jokowi>

105 *Op.cit.* <https://www.beritalima.com/2017/08/22/pater-nesles-dialog-sektoral-perlu-dilakukan-untuk-masalah-papua/>

tentang infrastruktur dan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan polemik dan sikap menolak yang kuat dari masyarakat. Inilah salah satu alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa dialog sektoral tidak menyelesaikan persoalan di Papua”.¹⁰⁶

Sahabat JDP yang lainnya dari Tanah Meepago Benediktus Goo berpendapat bahwa dialog sektoral ini adalah dialog untuk membicarakan pembangunan. Jaringan Damai Papua harus secara tepat merumuskan metode dan menempatkan orang yang tepat di dalam mekanisme dialog tersebut. Metode yang dipakai salah, begitu juga perwakilan orang-orangnya salah, maka dialog itu hanya untuk sebuah kepentingan. Menurutnya tugas dan peran JDP sebagai fasilitator bukan sebagai aktor. Artinya, JDP bertugas hanya mempersiapkan dan mempertemukan kedua kelompok yang bermasalah, duduk secara bersama, berbicara dan menyepakati solusi yang tepat untuk terwujudnya perdamaian di Tanah Papua.

REKOMENDASI

Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan

1. Presiden Joko Widodo memperkuat komitmennya dengan mensolidkan jajarannya untuk melaksanakan dan merealisasikan dialog Jakarta-Papua.
2. Presiden Joko Widodo memperkuat komitmen penyelesaian masalah Papua melalui jalan damai dialog terkait hak asasi manusia, sosial dan politik, dan aspirasi rakyat Papua.
3. Presiden Joko Widodo, bersama Kemenkopolkum dan Kemenhan memperkuat komitmennya menyelesaikan Papua dengan cara damai dan bermartabat; memerintahkan berbagai pihak untuk menghentikan cara-cara represif dan kekerasan terhadap masyarakat Papua.
4. Pemerintah Indonesia harus melibatkan dan mengajak pihak-pihak yang dipercaya dan representasi rakyat Papua untuk berdialog.

Organisasi Masyarakat Sipil; Jaringan Damai Papua, Tokoh Gereja, Media

1. Berbagai pihak di masyarakat Papua yang mendorong dialog harus mendengarkan suara rakyat akar rumput.
2. Pihak-pihak yang mendorong dialog hendaknya menawarkan dialog tentang sejarah dan persoalan politik di Tanah Papua kepada pihak pemerintah Indonesia.

¹⁰⁶Wawancara SKPKC Fransiskan Papua dengan Direktur LP3BH Manokwari Christian Warinussy di Jayapura pada 29 September 2017

3. Masyarakat atau publik harus memahami secara baik bahwa dialog itu bukan solusi tetapi media atau jalan untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia dan aspirasi politik di Tanah Papua.
4. Berbagai tokoh Papua terus bertemu untuk membahas dan memperkuat komitmennya untuk penyelesaian Papua melalui dialog Jakarta-Papua. Hal ini untuk menyolidkan diri terkait penyelesaian masalah Papua sesuai dengan kehendak rakyat Papua.
5. Media Massa membahas dialog Jakarta-Papua sebagai topik penting dalam liputan-liputannya, dan mampu menyajikan aspirasi dan persoalan Papua sesuai dengan fakta di lapangan.

Bab 9

**Kebijakan
Joko Widodo:
Infrastruktur
Minus
Hak Asasi Manusia**



Program Nawacita Presiden Joko Widodo memprioritaskan pada tumpuan pembangunan infrastruktur yang setara di berbagai wilayah, bahkan menekankan pembangunan di kawasan daerah luar Jawa, termasuk kawasan Timur, seperti Papua.

Prioritas pembangunan infrastruktur dinilai jawaban dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di sejumlah daerah. Namun, prioritas pembangunan infrastruktur Joko Widodo di Papua kurang diharapkan atau tak mendapat respon begitu positif.

Masyarakat Papua memiliki prioritas yang berbeda, memandang persoalan hak asasi manusia di berbagai bidang merupakan prioritas yang sesungguhnya diharapkan dalam pemerintahan Joko Widodo. Sejak awal terpilih, Joko Widodo – yang minus atau tanpa rekam jejak buruk pada permasalahan konflik dengan Papua – mendapat pengharapan besar bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi persoalan mendasar dan utama masyarakat Papua.

Tiap tahun Joko Widodo datang ke Tanah Papua untuk menggenapi janjinya pada pembangunan tetapi terus melupakan janjinya pada kemanusiaan dan martabat hak-hak asasi orang Papua.

PADA TAHUN 2017 Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua sebanyak dua kali. Kunjungan pertama Jokowi pada 9 – 10 Mei 2017 dan kedua pada 11 Desember 2017. Dalam kunjungan Jokowi ini mendapatkan apresiasi karena telah menunjukkan niat baik dalam menjalankan proyek pembangunan di Papua. Hal ini merujuk pada poin ketiga dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.¹⁰⁷ Daerah-daerah yang selama ini jauh dari Jakarta tak dijangkau oleh pembangunan kini telah merasakan langsung dan nyata dari proyek-proyek pembangunan tersebut.

Di Tanah Papua, ada pembangunan jalan raya yang dikenal dengan program Jalan Trans Papua, pembangunan Pasar Mama-Mama Papua di Kota Jayapura dan beberapa pasar dan proyek pembangunan infrastruktur lain yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Antara lain, Pasar Hamadi di Kota Jayapura, Jembatan Holtekam di Kota Jayapura, Kampus IPDN di Buper Waena, peletakan batu pertama pembangunan fasilitas PON 2020, dan peresmian kabel optik.¹⁰⁸ Di Kabupaten Jayapura, Presiden Joko Widodo meninjau pasar Prahara Sentani. Di Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo ke Manokwari untuk meresmikan Pembangunan Industri Petrokimia dan peresmian pembangunan pembangkit listrik proyek tangguh BUMN.

Proyek infrastruktur yang cukup dikenal dan sering dipromosikan adalah pembangunan jalan Trans Papua. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan jalan Trans Papua meliputi Merauke – Tanah Merah – Oksibil (688,07 Km); Perbatasan Papua Barat – Nabire – Waghete arah Timika – Enarotali (275,5 Km); Sorong – Pelabuhan Arar – Manokwari (594, 81 Km).¹⁰⁹ Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah X Kementerian PUPR, Thomas Setiabudi Aden, menyatakan jalan Trans Papua selesai pada 2019.

Dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut, sesungguhnya siapakan yang merasakan manfaatnya? Pembangunan infrastruktur tersebut untuk siapa? Untuk masyarakat Papua, pengusaha, investor?

Pertanyaan-pertanyaan demikian yang terus digumuli oleh orang asli Papua.

¹⁰⁷ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk>, diakses pada 10 Oktober 2018

¹⁰⁸ Lihat <https://www.antaranews.com/berita/494141/presiden-jokowi-akan-resmikan-proyek-pembangunan-di-papua>

¹⁰⁹ Lihat <http://tabloidjubi.com/m/artikel-3894-jalan-trans-papua-antara-propaganda-rencana-dan-kisah-nyata.html>, diakses pada 10 Oktober 2018

Karena, sejalan dengan proses pembangunan tersebut, pada kenyataannya bahwa orang asli Papua semakin tersingkir, mengalami diskriminasi, menghadapi kekerasan dan perlakuan represif, bahkan tak mendapatkan perlindungan dari negara.

Sejalan dengan segala proyek pembangunan dan meluasnya ekspansi investasi di Tanah Papua, Negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi melalaikan salah satu persoalan penting dan menjadi tanggung jawab negara yaitu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Negara melalui para pemimpinnya tercatat sebatas mengungkapkan janji-janji. Mulai dari janji menyelesaikan kasus penembakan di Lapangan Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014 hingga pembentukan tim penyelesaian Paniai, yang tak terlaksana.

Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan, pada akhir Maret 2016, mengatakan bahwa pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pemerintah menginginkan penyelesaian masalah HAM dengan bijak. Pemerintah juga tidak menghendaki agar persoalan HAM dibawa kemana-mana. Salah satu pernyataan yang juga mengejutkan adalah menyelesaikan masalah Papua melalui operasi militer. Hal itu menunjukkan bahwa negara masih sangat kental dengan pola lama dalam memandang dan menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Tanah Papua.¹¹⁰

Kemudian pada tahun yang sama, tepatnya pada 15 April 2016 di Kota Jayapura, untuk menindaklanjuti pernyataan, aparat keamanan di Tanah Papua menggelar diskusi dengan tema “Pendokumentasian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua”.¹¹¹ Mereka menghadirkan dan mengundang beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komnas HAM Perwakilan Papua. Diskusi ini membentuk sebuah tim yang disebut Tim Peduli Pelanggaran HAM di Papua. Dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan, diputuskan untuk fokus menyelesaikan tiga kasus pelanggaran HAM yakni Kasus Wasior 2001, Wamena Berdarah 2003 dan Paniai Berdarah 8 Desember 2014.¹¹² Bahkan tim ini berjanji akan menyelesaikan dalam kurun waktu 6 bulan semester kedua tahun 2016.

“Tim peduli pelanggaran HAM Papua merekomendasikan tiga kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Ketiga kasus itu adalah

¹¹⁰ Kronik SKPKC Fransiskan Papua tahun 2016 tentang Penyelesaian Persoalan HAM Papua.

¹¹¹ Sebanyak 13 kasus pelanggaran HAM Papua yang direkomendasikan untuk diselesaikan dalam kesempatan diskusi tersebut. Ketiga belas kasus tersebut adalah: Kasus Penyanderaan Mapenduma (1996), Biak Berdarah (1998), Penyerangan Mapolsek Abepura, Pembunuhan Theys, Pembobolan Gudang Senjata Makodim Wamena, Kerusuhan Uncen 16 Maret, Penembakan Opinus Tabuni, Pembunuhan Yawan Wayeni, Penangkapan dan Penembakan Kelly Kwalik, Kongres Rakyat Papua III, Penembakan Mako Tabuni, Kerusuhan Tinju di Nabire dan Kasus Paniai 2014. Lihat <http://tabloidjubi.com/16/2016/04/19/dimana-logika-polda-papua-fasilitasi-dokumentasi-masalah-ham-papua/>

¹¹² Lihat <http://tabloidjubi.com/16/2016/04/19/dimana-logika-polda-papua-fasilitasi-dokumentasi-masalah-ham-papua/>

Kasus Wasior 2001, Wamena Berdarah 2003 dan Paniai, 8 Desember 2014. Tiga kasus tersebut data awalnya sudah lengkap dan Komnas HAM juga sudah membentuk tim Ad Hoc sehingga menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Pihaknya siap bila nantinya ada anggota yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM”.¹¹³

Di Jakarta, Kamis (28 April 2016), Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus Arminsyah memastikan bahwa penanganan dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena tetap dilanjutkan. Menurut Arminsyah, sampai saat ini pihak penyidik masih membutuhkan keterangan ahli untuk membongkar perkara tersebut. Pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw dan pihak kejaksaan, diamini oleh Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti. Menurut Jendral Badrodin, ada tiga kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatian serius pemerintah, dua di antaranya ditangani oleh Kejagung (kasus Wasior dan Wamena Berdarah) sedangkan kasus Penembakan di Paniai, 8 Desember 2014 masih dalam tahap penyidikan.¹¹⁴

Kalangan pegiat hak asasi manusia dan para aktivis melihat keinginan dan kehendak negara ini terhadap persoalan hak asasi manusia tidak menumbuhkan sikap optimis. Salah satu pejuang HAM Papua, Pastor Jhon Jonga, Pr, pada 23 April 2016 di Wamena menyatakan keheranannya dengan cara pandang negara itu. “Saya rasa heran dan lucu saja karena sebagian besar pelakunya adalah mereka (aparatus keamanan) sendiri, pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua selama ini”.¹¹⁵ Hal senada juga disampaikan Direktur Elsham Papua Ferdinan Marisan pada 5 Mei 2016. Menurut Ferdinan, tidak ada proses pengendalian terhadap oknum TNI dan Polri yang melakukan pelanggaran HAM di Papua. Hal ini membuktikan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap segala pelanggaran HAM di Papua.

Pada tahun 2017, dengan begitu mudah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, negara mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan musyawarah mufakat. Wiranto menggambarkan penyelesaian kasus HAM dengan menggunakan salah satu tradisi di Papua, yakni tradisi bakar batu.¹¹⁶ Hal itu sulit dimengerti dalam konsep penyelesaian hak asasi manusia. Bagi orang Papua aparat keamanan yang melakukan penangkapan, penyiksaan dan penembakan, tidak pernah melakukan musyawarah mufakat sebelumnya.

¹¹³ Pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Senin (25 April 2016). Lihat Tabloid Jubi, 26 April 2016

¹¹⁴ Lihat Bintang Papua, 30 April 2016

¹¹⁵ Lihat Tabloid Jubi, 25 April 2016

¹¹⁶ Lihat <https://news.detik.com/berita/d-3654332/soal-penyelesaian-kasus-ham-wiranto-merujuk-ke-adat-bakar-batu>

REKOMENDASI

Presiden Joko Widodo, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan

1. Presiden Joko Widodo memperbaiki pendekatan keamanan dalam penyelesaian persoal hak asasi manusia di Tanah Papua.
2. Presiden Joko Widodo memberikan prioritas dan kebijakannya bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.
3. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kemenkopolkam dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diputuskan oleh tim yang pernah dibentuk.
4. Kementerian Politik Hukum dan Keamanan melaksanakan kebijakan Joko Widodo yang memberikan kebebasan akses media asing.
5. Kementerian Politik Hukum dan Keamanan melaksanakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan aspirasi rakyat Papua.
6. Pemerintahan Indonesia harus bersedia mengakui segala pelanggaran HAM yang dilakukan di Tanah Papua dan memproses para pelakunya sesuai hukum dan rasa keadilan rakyat Papua.
7. Menempatkan hak asasi manusia berbagai bidang dalam prioritas kebijakan, sehingga proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia bisa dilaksanakan.

Bab 10

Penutup



Dunia memahami Papua masih terus bergejolak, satu di antaranya adanya pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan serius yang mengancam keberlangsungan hidup penduduk Papua. Peristiwa konflik, kekerasan, dan tragedi kemanusiaan terjadi di Tanah Papua itu tersiarakan hingga ke dunia internasional.

Pendekatan keamanan dalam menyelesaikan gejolak dan ragam fenomena sosial di Tanah Papua menguburkan gerakan Papua Tanah Damai yang pernah dideklarasikan. Anak-anak, orang muda, dan masyarakat Papua telah menjadi korban tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Kekerasan menyebar ke berbagai penjuru, dari perkampungan hingga perkotaan di wilayah Papua. Generasi baru Papua; anak-anak yang lahir, remaja, dan beranjak dewasa tumbuh dan berkembang dalam budaya kekerasan dan konflik. Bahkan, sebagian generasi hilang karena hidupnya berakhir di ujung senjata.

LAPORAN peristiwa dan fakta hak asasi manusia sepanjang 2017 telah terekam dalam Seri Memoria Passionis No.35 menggambarkan budaya kekerasan telah memberikan kontribusi bagi hilangnya generasi baru Papua. Sementara itu anak-anak dan kalangan muda Papua tumbuh dalam budaya kekerasan dan konflik.

Memoria Passionis dalam buku ini mengungkap sembilan fenomena atau peristiwa hak asasi manusia yang tak juga memberikan kabar gembira. Pengalaman buruk masih membayangi warga masyarakat Papua; dari tragedi kematian anak-anak di Deiyai dan Lanny Jaya, Operasi aparat keamanan yang diwarnai kekerasan, perampasan tanah warga, dan tragedi kemanusiaan di bidang kesehatan; kematian anak-anak, dan ancaman besar HIV AIDS.

Pemenuhan hak-hak dasar ekonomi, sosial, budaya atau Ekosob dalam laporan buku ini adalah persoalan mendasar yang masih terabaikan dan tak mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Memoria Passionis terus menyoroti dan memberikan kritik dan masukan kepada Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Dan, kali ini tetap menyuarakan dan memberikan kritik yang sama, karena bagian ini tetap ditelantarkan, meskipun korban dan kematian terus berjatuhan.

Beban pemenuhan hak-hak asasi manusia semakin berat, lebih-lebih dalam hak-hak sipil dan politik. Pemerintah tetap kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus hak asasi manusia. Hal ini disebabkan salah satunya adalah komitmen atau kemauan politik Pemerintah yang lemah dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dan lima tahun terakhir.

Sempat inisiasi pembentukan penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Beberapa tokoh Papua pernah diundang ke Istana Negara dan bertemu dengan Joko Widodo yang akan membentuk tim dialog Jakarta-Papua untuk penyelesaian konflik di Papua, tetapi rencana ini pun kandas dalam proses pembentukan tim dan macetnya komunikasi di kalangan pemerintah dan berbagai pihak masyarakat di Papua.

Langkah yang cepat pupus dalam proses dan perjalanan mencerminkan belum adanya komitmen serius dan kuat dalam menyelesaikan konflik Papua secara damai melalui dialog. Pemerintah juga nampak ragu dalam menyentuh jantung masalah Papua, yaitu politik aspirasi kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri yang disuarakan dan dikehendaki oleh rakyat Papua. Pemerintah masih menilai pembangunan sebagai cara dan strategi penyelesaian konflik Papua, dan mengabaikan persoalan hak asasi manusia yang sesungguhnya menjadi persoalan utama bagi rakyat Papua.

Konflik Papua yang berlangsung dan tanpa ada tanda-tanda penyelesaian hingga kini menghilangkan generasi baru Papua: anak-anak dan orang muda yang menjadi tunas baru generasi saat ini hilang dari zamannya karena tewas oleh senjata dan virus atau wabah penyakit. Generasi Papua saat ini menghadapi zaman yang keras penuh tantangan dan rintangan, lahir dan tumbuh, bahkan hilang di tengah endemi kekerasan yang tak terkendali.

Kabar situasi hak asasi manusia di Tanah Papua kembali terdengar tak mengenankan, bahkan buruk. Laporan Memoria Passionis No.35, “Yang Hilang dan Tumbuh dalam ‘Endemi’ Kekerasan” ini mengungkap beragam peristiwa dan fakta situasi hak asasi manusia pada 2017. Generasi baru atau muda Papua hidup di tengah ancaman kekerasan, yang berisiko menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, buruknya layanan kesehatan telah mengancam kematian generasi baru.

Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang buruk menyebabkan kasus-kasus kematian anak-anak terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2017, wabah penyakit merenggut nyawa bayi dan anak-anak di beberapa kampung pedalaman di kabupaten Lanny Jaya, Deiyai, Yahukimo, dan Merauke. Lalu, kematian karena HIV AIDS juga tercatat dalam jumlah yang signifikan. Kasus HIV AIDS dilaporkan jumlahnya meningkat.

Kemudian, kematian akibat kekerasan dan penembakan oleh aparat keamanan dialami orang-orang Papua, sebagian orang muda, terjadi di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Kepulauan Yapen, Mappi. Represi aparat keamanan mendapatkan catatan penting dalam kasus-kasus kekerasan di beberapa daerah tersebut.

Ruang kebebasan berekspresi di Tanah Papua tercatat masih memprihatinkan. Orang-orang Papua tak bebas bicara tentang situasi yang dialaminya di ruang publik. Aksi demonstrasi damai dibatasi oleh aparat keamanan. Kasus yang tergolong berat adalah pembatasan ruang berekspresi aktivis dan mahasiswa Papua di kota-kota studi di Jawa, Sulawesi, dan pulau lainnya.

Laporan seri Memoria Passionis ini berupaya mendokumentasikan persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dialami orang-orang Papua. Memoria Passionis atau Ingatan Penderitaan adalah bagian penegakan dan perjuangan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di Tanah Papua.

